

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PASCABENCANA BANJIR BANDANG
DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FAUZAN HAKIKI
NIM. 210802145

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

TAHUN 2026

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Hakiki
NIM : 210802145
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Batam, 9 April 2003
Alamat : Beuringin, Peureulak Barat, Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Fauzan Hakiki

NIM. 210802145

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PASCABENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN ACEH

TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-I)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

FAUZAN HAKIKI

NIM. 210802145

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

NIP. 197810162008011011


Dr. Taufik, S.Sos., M. Si.

NIP. 1989051882023211032

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN ACEH TIMUR

FAUZAN HAKIKI

NIM. 210802145

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dan dinyatakan Lulus serta diterima sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari /Tanggal : **06 Agustus 2026**

22 Safar 1448 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Thalal, Lc., M. Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 1989051882023211032

Penguji I

Penguji II


Dr. Delfi Suganda, S.H., LL.M.
NIP. 198611122015031005


Putri Marzanar, MPA.
NIP. 199811022024032001

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan pascabencana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya dampak banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, permukiman, serta terganggunya kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan, seperti keterlambatan distribusi bantuan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pihak BPBD Kabupaten Aceh Timur, Dinas Sosial, pemerintah gampong, dan masyarakat terdampak. Analisis penelitian menggunakan teori akuntabilitas Sheila Elwood yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur telah dilaksanakan melalui kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan prosedur penanganan bencana, pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penyusunan kebijakan penanggulangan bencana. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, akses menuju lokasi terdampak yang sulit, keterlambatan penyaluran bantuan, serta kurang optimalnya koordinasi dan validitas data penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, pembaruan sistem pendataan, serta peningkatan kesiapsiagaan pemerintah agar penanganan pascabencana dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pascabencana, Banjir Bandang, BPBD, Kabupaten Aceh Timur.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan berkat karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan proposal yang berjudul Transformasi Digital Sebagai Alat Penyederhanaan Birokrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dengan waktu yang tepat. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh nilai mata kuliah akhir. Selama melakukan penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak dukungan, arahan, serta bimbingan dari para kerabat, Dosen dan berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc, Sc. Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- 
4. Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Reza Idria, M.A., Ph.D. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Muazzinah, B.Sc., M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Zakki Fuad Khalil, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
8. Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta selaku pembimbing I skripsi yang telah memberikan masukan luar biasa dan menjadi tempat diskusi akan semua persoalan yang didapati dalam menulis skripsi ini.
9. Dr. Taufik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen pembimbing II skripsi yang telah memberikan saran, masukan dan arahan yang luar biasa dalam penyusunan

skripsi, serta meluangkan banyak waktu secara langsung maupun

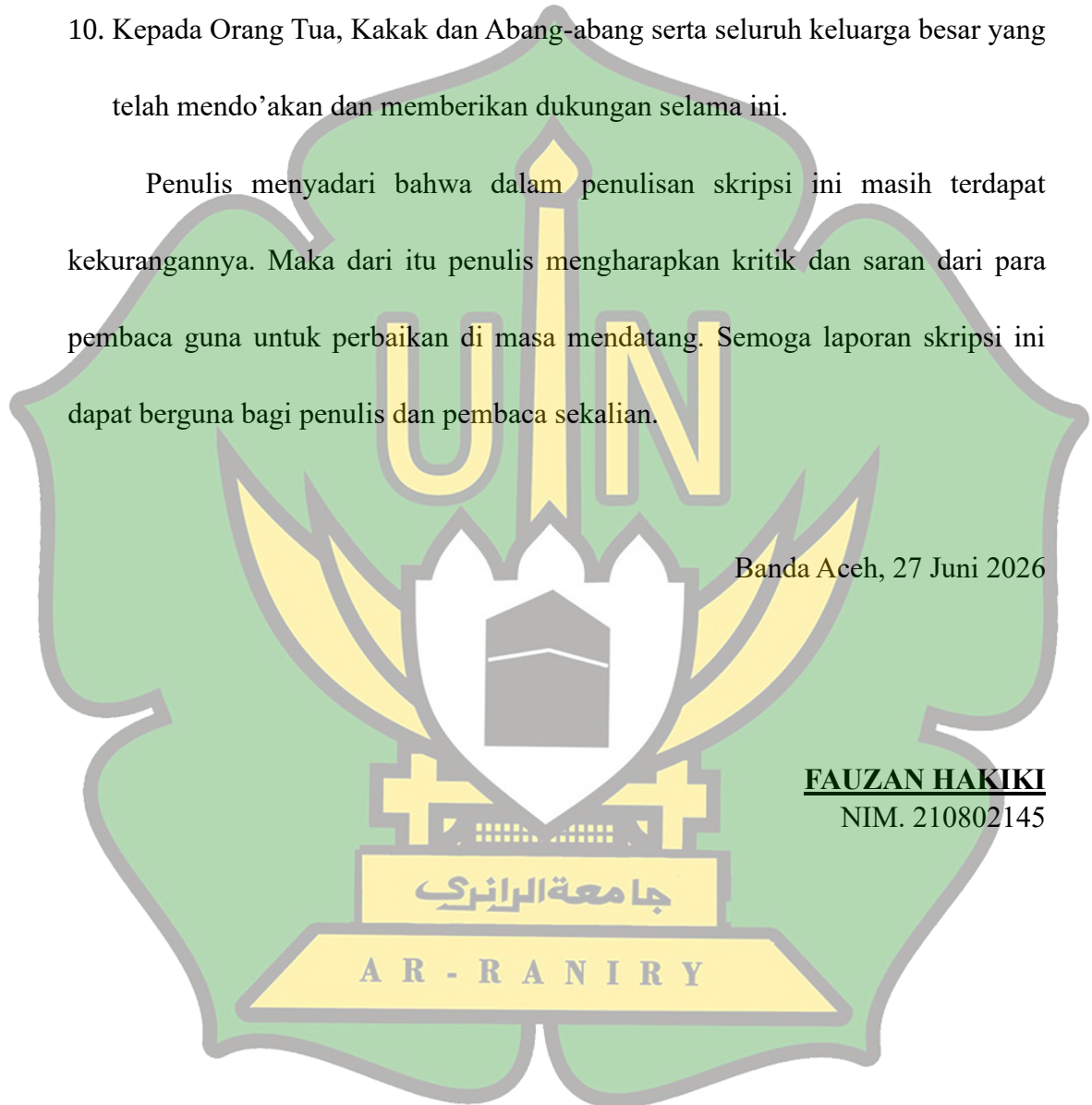
berkomunikasi melalui media WhatsApp untuk kelancaran proses bimbingan.

10. Kepada Orang Tua, Kakak dan Abang-abang serta seluruh keluarga besar yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangannya. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca sekalian.

Banda Aceh, 27 Juni 2026

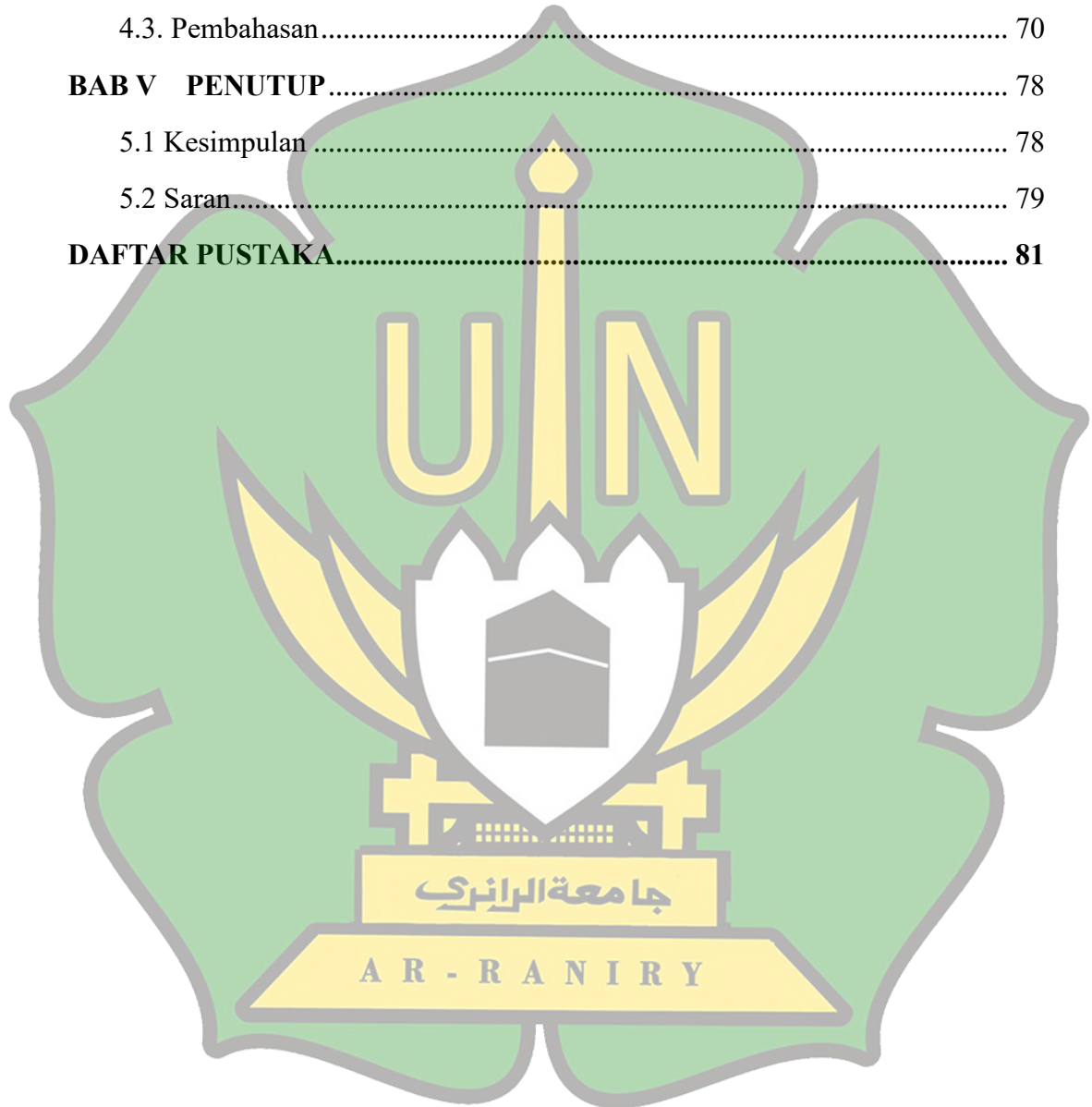
FAUZAN HAKIKI
NIM. 210802145



DAFTAR ISI

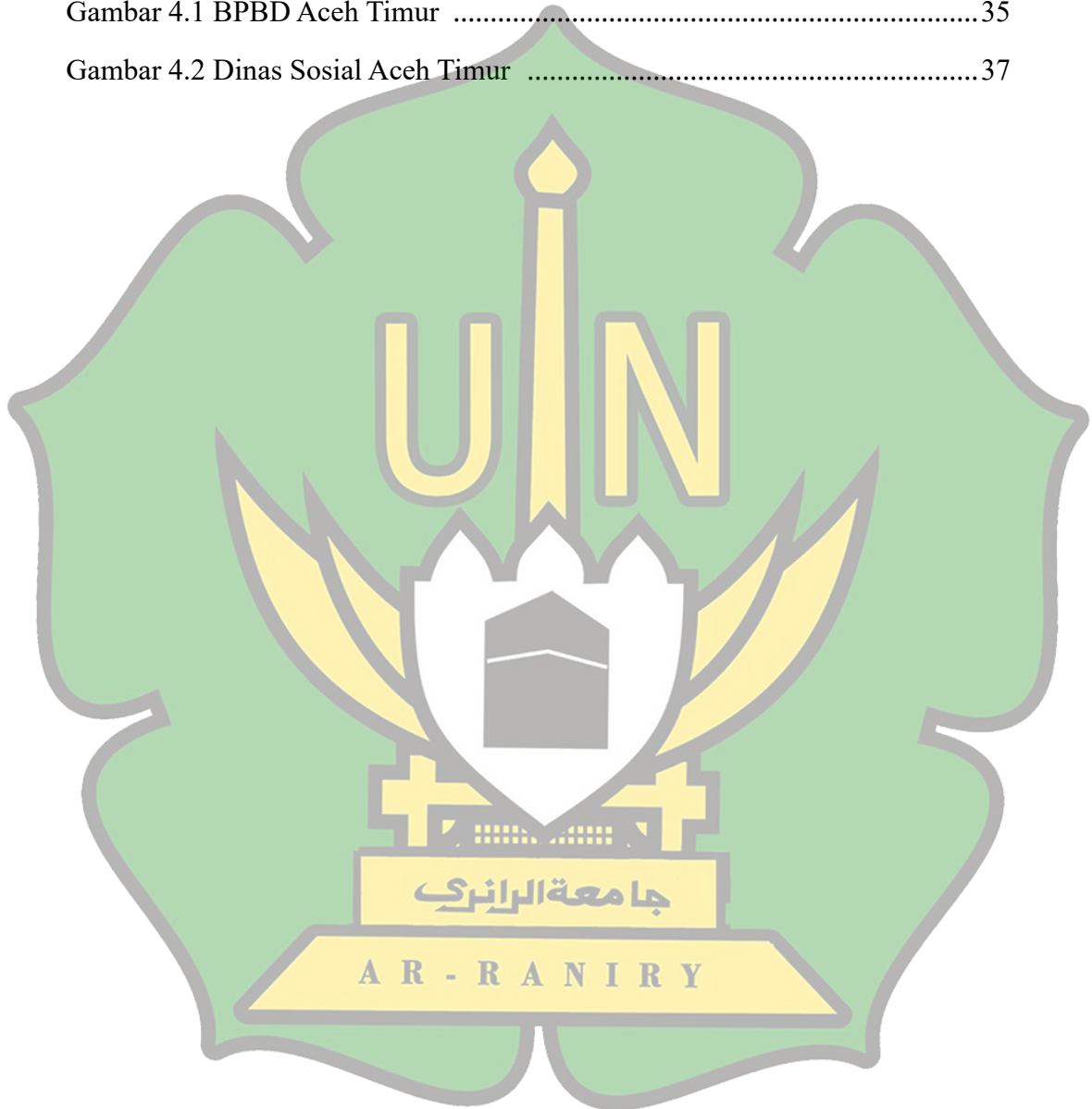
KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Landasan Teori	14
2.3. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Desain Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	28
3.3. Lokasi Penelitian.....	28
3.4. Sumber dan Bentuk Data	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
3.6. Informan Penelitian.....	31
3.7. Keabsahan Data.....	31
3.8. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35
4.2. Hasil Penelitian	39
4.3. Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81



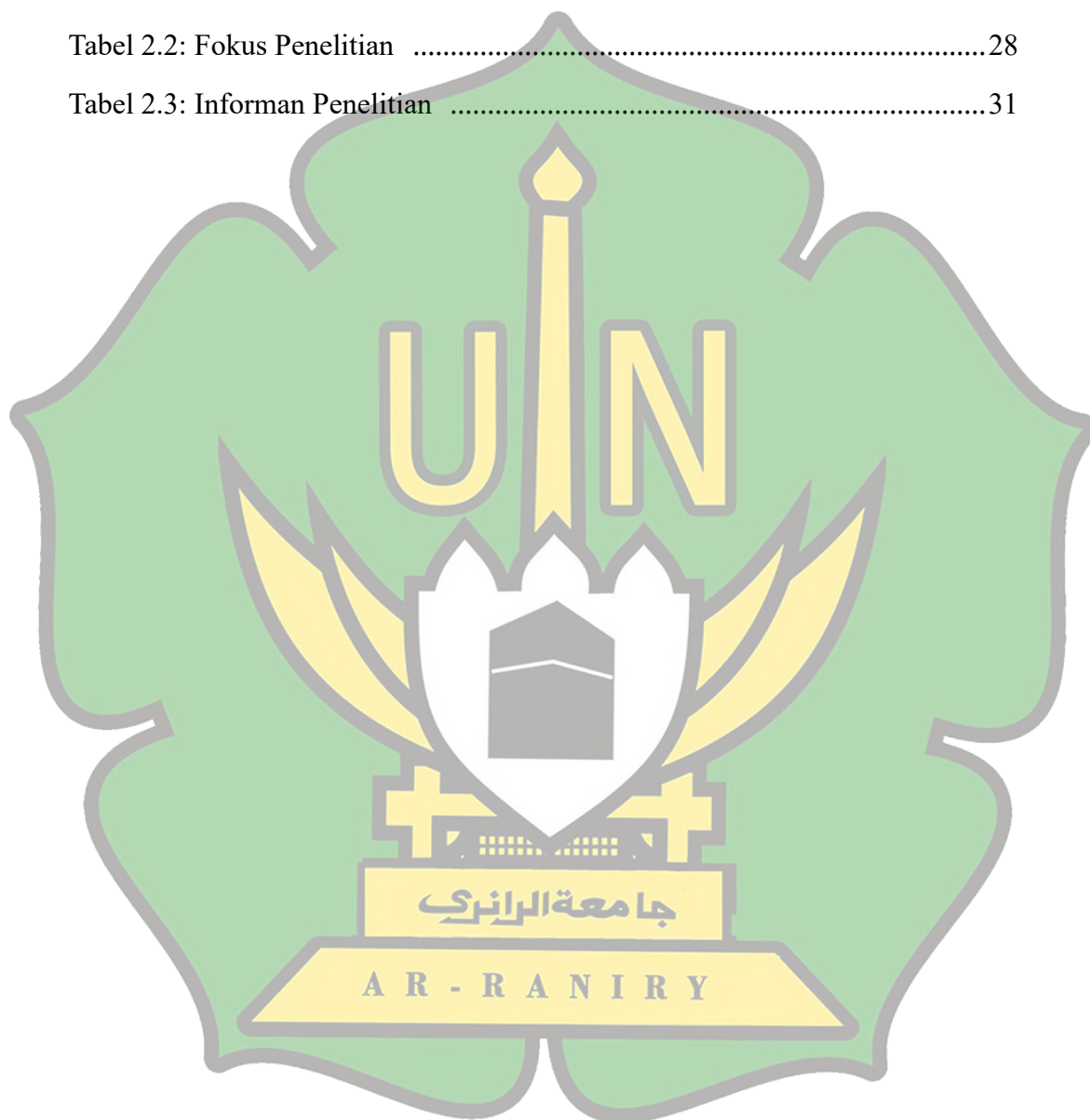
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bencana Di Aceh Tahun 2025	2
Gambar 4.1 BPBD Aceh Timur	35
Gambar 4.2 Dinas Sosial Aceh Timur	37



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Literatur Review	9
Tabel 2.2: Fokus Penelitian	28
Tabel 2.3: Informan Penelitian	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Banjir merupakan bencana alam yang terjadi karena terlalu banyaknya air yang merendam permukaan daratan. Masyarakat sudah tidak heran jika terjadi banjir pada saat musim hujan. Salah satu penyebab banjir yaitu karena intensitas dan curah hujan yang tinggi, khususnya bagi masyarakat dataran rendah. Selain itu, kapasitas sungai yang kecil juga dapat menyebabkan banjir. Jika intensitas hujan tinggi maka volume air yang mengalir juga tinggi. Apabila kapasitas sungai tidak memadai karena terlalu kecil, hal ini akan membuat air tidak mempunyai tempat dan akhirnya meluap hingga banjir.¹

Beberapa wilayah di Indonesia sangat rentan terkena bencana. Salah satunya adalah Aceh, sejumlah kabupaten kota di Aceh mengalami bencana di setiap tahunnya. Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil hampir dipastikan terdapat titik banjir.² Berikut data grafik tahun lalu yang pernah terjadi di Aceh.

¹ BNPB, “Alam, Ingat!!! Banjir Tidak Sepenuhnya Bencana Yang Disebabkan Kondisi” (2021).

² Rahmi Inayati and Muhammad Ikram Mullah, “Penanggulangan Bencana Banjir Di Aceh: Psikologis Dan Strategi Efektif” 1, no. 2 (2022).

Gambar 1.1 Bencana Di Aceh Tahun 2025



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2025

Infografis di atas merupakan infografis Bencana di Aceh Tahun 2025 yang memaparkan data kejadian bencana periode Januari hingga Mei 2025. Berdasarkan data tersebut, bencana yang terjadi terdiri dari beberapa jenis, yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, tanah longsor, abrasi, gempa bumi, serta gelombang pasang. Secara keseluruhan tercatat 138 kali kejadian bencana dengan perkiraan kerugian mencapai 102 miliar rupiah. Dari sisi dampak, ribuan kepala keluarga terdampak yang tersebar di ratusan desa dan puluhan kecamatan, terdapat korban meninggal dunia dan luka-luka, serta ratusan warga harus mengungsi. Selain itu, kerusakan material meliputi ratusan rumah rusak, kerusakan sekolah, sarana ibadah, jembatan, tanggul, serta puluhan hektar lahan terdampak. Data ini

menunjukkan bahwa sepanjang awal tahun 2025, berbagai jenis bencana memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan infrastruktur di Aceh.³

Banjir di Kabupaten Aceh Timur terdapat kerusakan parah akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Sebanyak 17.120- unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat. Sebagian besar kerusakan berat terjadi di kawasan dataran rendah dan permukiman dekat daerah aliran sungai. Tingginya intensitas hujan yang berlangsung lama menyebabkan sungai meluap dan merendam rumah dengan ketinggian air mencapai 10 sentimeter hingga 3 meter. Kerusakan ini berdampak ribuan warga kehilangan rumahnya. Data BPBD mencatat sebanyak 20.612 jiwa dari 6.423 keluarga mengungsi di 50 titik pengungsian. Sementara itu, 1.618 jiwa dari 426 keluarga lainnya memilih bertahan di rumah meski dalam kondisi terdampak.⁴

Warga Aceh mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah dan meminta pertolongan, karena tiga minggu pascabencana bantuan masih minim. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat yang tidak menetapkan status darurat nasional dan menolak bantuan luar, ini merupakan bentuk “kelalaian negara” dalam penanganan bencana.⁵ Mengenai hal ini menjadi penting dan mendesak untuk

³ Rino Abonita, “Bencana Di Aceh Januari - Mei 2025 Makan Korban 10 Orang,” 2025.

⁴ Whisnu Mardiansyah. “17.120 Rumah Di Aceh Timur Rusak Akibat Banjir, Kerugian Ditaksir Capai Rp5,8 Triliun”. *Metrotvnews.Com* (Nasional: 19 December 2025).

⁵ Arn. “Media Asing Soroti Kegagalan Penanganan Banjir Bandang dan Longsor Aceh”. (Dialeksis:

dilakukan mengingat tingginya intensitas dan dampak bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur dengan ibu kota Idi Rayeuk, pada akhir tahun 2025. Seluas 6.040,60 km² yang terdiri atas 24 kecamatan, 59 mukim, dan 513 gampong. Bencana banjir hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Timur pada Rabu 26 November 2025 telah berdampak luas terhadap masyarakat dan infrastruktur. Berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Aceh Timur per 15 Desember 2025, tercatat 73.531 kepala keluarga atau 265.723 jiwa terdampak langsung oleh bencana ini.

Bencana tersebut mengakibatkan 53 jiwa meninggal dunia, 644 jiwa mengalami luka-luka, serta 1.819 jiwa menderita sakit. Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni. Kerusakan permukiman warga tergolong signifikan, dengan 7.402-unit rumah rusak berat, 4.741-unit rusak sedang, dan 6.977-unit rusak ringan. Rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan, seperti jembatan putus, jalan longsor, rumah ibadah, sekolah, meunasah, dermaga boat, serta fasilitas layanan publik lainnya. Total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 5,63 triliun.⁶

Tanggung jawab ini merupakan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi warga negara, bukan pengganti tanggung jawab pelaku kerusakan

2025). Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2026.

⁶ M. Habibi. "Info Bencana Banjir Hidrometeorologi Aceh Timur 2025". Dinas Pertahanan Aceh Timur: 18 Desember 2025. Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2025.

lingkungan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 (Pasal 5) Menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana tidak hanya sebatas memberikan bantuan pada saat keadaan darurat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan rumah dan fasilitas umum yang rusak, serta upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana. Pemerintah juga berkewajiban memastikan koordinasi antarinstansi berjalan secara efektif dan bantuan diberikan secara tepat sasaran. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban negara dalam melindungi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan permasalahan kasus banjir yang ada di Aceh timur dan banyaknya bencana yang terjadi dengan kerusakan yang semakin meningkat meskipun telah diberikan berbagai macam sumber daya yang melimpah dan kewenangan serta kelembagaan memadai yang bertugas menanggulangi kebencanaan kepada daerah, menunjukkan bahwa terdapat banyaknya persoalan yang terjadi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai banjir lebih banyak membahas faktor penyebab, pemetaan daerah rawan banjir, serta

strategi mitigasi secara umum. Namun demikian, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji penanganan banjir lokal pada wilayah penelitian ini dengan mempertimbangkan kondisi karakteristik wilayah, kapasitas drainase, serta peran para pemangku kepentingan dalam penanggulangan banjir.

Peluang penelitian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu memberikan gambaran secara lebih mendalam mengenai akuntabilitas pemerintah dalam pasca penanganan banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas pemerintah dalam proses penanganan pascabencana sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kendala, upaya, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penanganan pascabencana banjir bandang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan

1. Tingginya intensitas dan dampak bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur.
2. Lambannya tanggungjawab pemerintah³, koordinasi penanganan yang kacau, serta faktor lingkungan dan kebijakan yang memperparah dampak

bencana.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat koordinasi Pertanggungjawaban penanganan banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur dalam pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat koordinasi pertanggungjawaban penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan penerapan hasil

penelitian dalam kehidupan nyata.

1. Manfaat Praktis

- a. Menambah referensi akademis terkait akuntabilitas kebijakan pemerintah, khususnya penanganan banjir.
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pemerintah Aceh Timur, sebagai bahan penilaian dan pengembangan kebijakan lebih lanjut terkait penanggulangan banjir.
- b. Bagi daerah terdampak, memberi pendapat untuk menangani banjir di kemudian hari.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Literatur Review

No.	Penulis dan Tahun Terbit	Kerangka konseptual	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
	Agus Safrizal (2023)	Banjir Bandang Sebagai Masalah Kesejahteraan Sosial Di Aceh Telaah Kontemporer Dan Pendekatan Pekerjaan Sosial	Kualitatif	Banjir bandang di aceh tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan masalah kesejahteraan sosial seperti hilangnya mata pencarian, terganggunya fungsi keluarga, meningkatnya risiko kemiskinan, serta masalah psikososial, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, sementara penanganan bencana yang masih berfokus pada tindakan darurat, bersifat top-down, dan lemahnya koordinasi antar lembaga	T: Perspektif Islam dan Pendekatan Pekerjaan Sosial vs Akuntabilitas L: Aceh Vs Aceh Timur P: Banjir bandang sebagai masalah kesejahteraan sosial di aceh telaah islam kontemporer dan pendekatan pekerjaan sosial VS responsivitas kebijakan pemerintah dalam penanggulangan banjir bandang di kabupaten aceh timur.

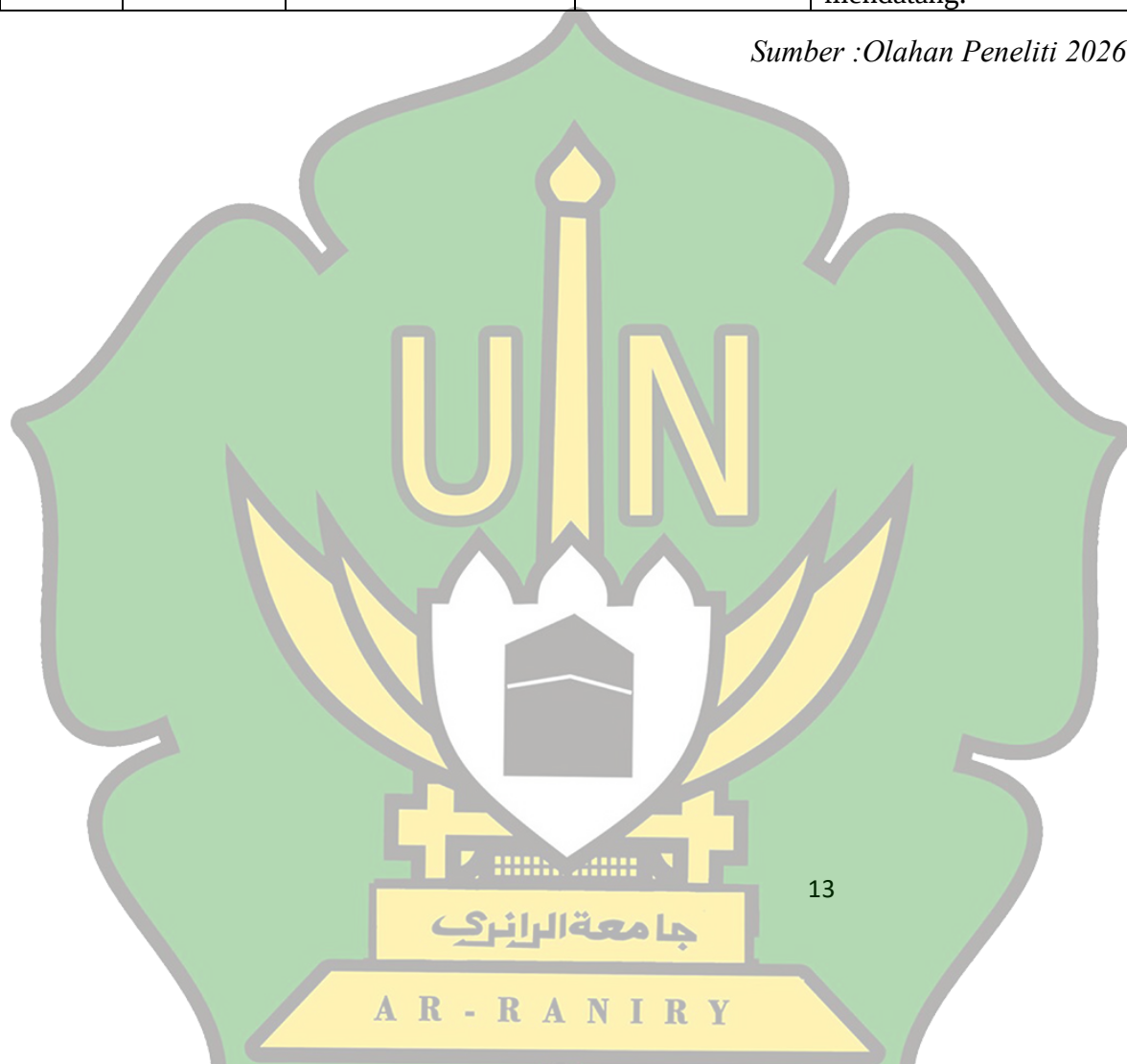
				berpotensi menghambat pemulihan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.	
	Rahmadan i Kiki (2023)	Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Medan	Kualitatif	BPBD Kota Medan dinilai cukup responsif dalam penanganan tanggap darurat banjir melalui pembentukan Keltana, penyediaan jalur evakuasi, pos kesiapsiagaan bencana, serta forum pengaduan masyarakat. Namun, responsivitas tersebut masih memiliki kelemahan, terutama keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya interaksi dua arah dengan masyarakat, dan lambatnya pemberian bantuan karena prioritas pada wilayah dengan tingkat keparahan lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta penguatan komunikasi dua arah agar pelayanan tanggap darurat dapat berjalan lebih efektif.	T : Manajemen Bencana vs Akuntabilitas L : Medan vs Aceh Timur P : Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Medan vs Responsivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Timur.
	Desta Putri Rizki (2025)	Responsivitas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kualitatif	BPBD perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan penambahan personel terlatih, disertai penguatan sistem informasi kebencanaan	T : Responsivitas Pelayanan Publik dan Manajemen Bencana vs akuntabilitas L : Bandar Lampung vs Aceh Timur P : Responsivitas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

		dalam Menanggulangi Bencana Alam (Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung)		berbasis teknologi dan pemanfaatan media sosial, peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, peningkatan alokasi anggaran untuk mitigasi serta penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan simulasi tanggap darurat, serta pengembangan kepemimpinan BPBD yang responsif, adaptif, dan kolaboratif.	Daerah dalam Menanggulangi Bencana Alam (Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung) vs Responsivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Timur.
Irfan Fajar (2022)	Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menghadapi Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Timur	Kualitatif		Responsivitas BPBD Kabupaten Aceh Timur dalam penanggulangan bencana banjir telah menerapkan prinsip cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, serta bersifat nondiskriminatif dan nonpolitis, sehingga mampu memfokuskan penanganan pada penyelamatan korban dan pemulihan pascabencana. Keberhasilan tersebut didukung oleh kerja sama yang kuat antar pemangku kepentingan serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat pada tahap pra, saat, dan pascabencana untuk membangun	T : Responsivitas vs Penanggulangan bencana nasional berdsarkan undang-undang Nomor 24 tahun 2007 L : Aceh Timur vs Aceh Timur P : akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menghadapi Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Timur vs Responsivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Timur.

				ketangguhan. Namun, penanggulangan bencana masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan alokasi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.	
	Dian Widiya (2024)	Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang	Deskriptif Kualitatif	Responsivitas BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di kabupaten aceh tamiang masih belum optimal, yang terlihat dari ketepatan tindakan, kecermatan, serta ketepatan waktu pelayanan, meskipun BPBD telah berupaya merespons keluhan masyarakat terutama dalam proses evakuasi dan pendistribusian bantuan logistik. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang menghambat kinerja BPBD dan menimbulkan keluhan dari masyarakat terdampak. Perlu upaya perbaikan melalui peningkatan anggaran, penguatan dan pelatihan SDM, pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, serta penguatan kerja sama lintas sektor	T : akuntabilitas Pelayanan Publik vs Responsivitas L : Aceh Tamiang vs Aceh Timur P : Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang vs Responsivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Timur.

				dan partisipasi aktif masyarakat guna meningkatkan responsivitas dan kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi bencana banjir di masa mendatang.	
--	--	--	--	--	--

Sumber :Olahan Peneliti 2026



2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan bahwa sebuah instansi pemerintah telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah diamanahkan oleh rakyat, maka akuntabilitas dapat diukur sebagaimana mereka mempertahankan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas guna mencapai hasil.

Menurut Elwood ia menyatakan bahwa Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi, akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.⁷

Akuntabilitas merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Kelembagaan pemerintahan yang menerapkan akuntabilitas publik lembaga tersebut selalu dapat mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik, demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab besar. Tanggung jawab masyarakat terhadap kontrol lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

Sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik merupakan

⁷ Sumarsono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 15

prasyarat penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Tanggung jawab dari lembaga pemerintah dalam memahami dan menanggapi kebutuhan publik akan informasi yang mudah didapatkan merupakan kriteria yang paling tepat untuk mengukur administrasi publik yang demokratis. Pemerintah harus mampu memperluas penyedia pelayanan publik serta menunjang informasi atau menetapkan standar untuk menjamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan public.

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut mengenai asas akuntabilitas yang merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan akurat sehingga dapat menjamin terselenggaranya birokrasi dan pembangunan yang secara efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN).⁸

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari birokrasi terkait akankebutuhan masyarakat, seperti dikemukakan oleh Mahmudi, yang dikutip dari jurnal Ilmu Pemerintahan Unsrat oleh Bill Cristian dkk bahwa Akuntabilitas merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerja kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas juga dikaitkan dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.⁹

Dari beberapa pengertian diatas mengenai akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok

⁸ Siti Jamilah Said, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Makassar, 2020 Diakses dari <http://journal.unismuh.ac.id>, Pada Tanggal 10 Januari 2023 Pukul 19:58 WIB

⁹ Bill CR dkk, *Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkuan*, Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Usrat, 2018, hlm. 4

orang yaitu sebuah badan atau organisasi yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Sehingga dalam negara yang otokratik dan tidak transparan, akuntabilitas akan hilang dan tidak berlaku. Oleh karena itu pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan.

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sheila Elwood karena teori tersebut memberikan kerangka analisis yang komprehensif melalui empat dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Keempat dimensi tersebut dinilai mampu menggambarkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah secara menyeluruh, mulai dari kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan proses penanganan, pencapaian program, hingga kesesuaian kebijakan yang diterapkan.¹⁰

Teori ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji akuntabilitas pemerintah dalam pasca penanganan banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur. Dalam penanganan pascabencana, pemerintah tidak hanya dituntut

¹⁰ Linda Widawati, *Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sridadi kecamatan rembang kabupaten rembang tahun 2016*, 2024, halm 4.

untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus melaksanakan proses penanganan secara transparan, memastikan program pemulihan berjalan efektif, serta menetapkan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, teori Sheila Elwood dinilai lebih relevan sebagai landasan analisis dibandingkan teori akuntabilitas lainnya karena mampu mengevaluasi akuntabilitas pemerintah dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Adapun indikator dari akuntabilitas menurut Sheila Elwood adalah sebagai berikut;¹¹

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
2. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah

¹¹ Linda Widawati, *Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sridadi kecamatan rembang kabupaten rembang tahun 2016*, 2024, halm 4.

pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.¹²

2.2.2. Konsep Banjir Bandang

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan topografi yang beragam serta curah hujan yang tinggi menjadikan negara ini rentan terhadap banjir. Banjir dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya nyawa manusia. Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan pada daerah datar sekitar sungai sebagai akibat meluapnya air sungai yang tidak mampu ditampung oleh sungai.¹³ Penyebab banjir bisa terjadi karena berbagai hal baik alam maupun manusia. Banjir dapat diakibatkan oleh peristiwa alam seperti curah hujan dalam jangka waktu yang lama, terjadinya banjir tanah hingga hanya menyisakan batuan, dan tidak ada resapan air.¹⁴

¹² Raba Manggaukang, *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers), 2006, hal. 37

¹³ Rahmadhani, R. (2023). *Strategi dan program pencegahan banjir di Indonesia*. Researchgate. Net, May.

¹⁴ Kusumo, P., & Nursari, E. (2016). *Zonasi tingkat kerawanan banjir dengan sistem informasi geografis pada DAS Cidurian Kab. Serang, Banten*. STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi

Berdasarkan mekanisme terjadinya, banjir dibedakan menjadi banjir biasa (regular) yang terjadi akibat jumlah limpasan yang sangat banyak sehingga melampaui kapasitas dari pembuangan air dan banjir tidak biasa (irregular) yang terjadi akibat tsunami, gelombang pasang, luapan air sungai. Berdasarkan posisi sumber terhadap daerah yang digenangnya, banjir dapat dibedakan menjadi¹⁵:

1. Banjir Lokal

Banjir lokal adalah banjir yang terjadi hanya di wilayah tertentu akibat faktor lingkungan setempat, seperti hujan deras, drainase buruk, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air. Banjir ini biasanya menyebabkan genangan di jalan atau permukiman dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Cara mengatasinya adalah dengan menjaga kebersihan saluran air, memperbaiki drainase, dan menambah area resapan air.¹⁶

2. Banjir Bandang

Banjir yang terjadi akibat hujan yang berintensitas tinggi dan air sungai meluap ke permukaan dengan waktu yang cepat. Banjir bandang terjadi saat penjuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan cepat sehingga tidak dapat diserap lagi.

Teknologi), 1(1).

¹⁵ Alda, M. P. (2025). *Analisis Pemetaan Daerah Potensi Rawan Banjir di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*.

¹⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Definisi dan Jenis Banjir*, <https://www.bnpb.go.id/>

Banjir bandang merupakan banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung cepat. Banjir ini umumnya terjadi akibat hasil dari curah hujan yang berintensitas tinggi dengan durasi pendek, sehingga menyebabkan debit air sungai naik secara cepat. Sebagian besar banjir ini diawali oleh adanya longsoran dibagian hulu sungai dan menimbulkan bendungan-bendungan alami. Penyebab terjadinya banjir bandang berupa curah hujan, kondisi geologi, morfologi maupun tutupan lahan.

Banjir bandang merupakan fenomena yang paling merusak di antara bencana alam dalam hal orang yang terkena dampak. Banjir bandang memiliki karakteristik yang berbeda dengan banjir biasa (pluvialflood), terutama dalam skala waktu yang singkat dan terjadi dalam skala ruang kecil, yang membuat peramalan banjirbandang menjadi tantangan yang cukup berbeda dengan pendekatan prakiraan banjir biasa.¹⁷

Prediksi banjir bandang, terutama memperhatikan kejadian dan difokuskan pada dua peristiwa penyebab yaitu curah hujan yang sangat tinggi dan hujan pada kondisi tanah yang sudah jenuh. Menurut Badan Meteorologi Dunia (WMO), banjir bandang adalah banjir yang berdurasi singkat dengan debit puncak yang relatif tinggi. Intensitas curah hujan merupakan faktor penting yang perlu

¹⁷ Ginting, S. (2021). *Analisis curah hujan penyebab banjir bandang di ujung berung, bandung. Akselerasi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 2(2).

dipertimbangkan ketika memeriksa kondisi hujan pada saat banjir bandang.¹⁸

Curah hujan dengan intensitas sangat tinggi biasanya ditemukan pada curah hujan konvektif. Lamanya curah hujan intensitas tinggi merupakan faktor utama lain yang menentukan risiko banjir bandang. Banjir menjadi masalah pada saat musim hujan, karena daya dukung daerah aliran sungai terhadap hujan yang turun sudah tidak mampu. Perubahan iklim yang dapat meningkatkan intensitas hujan dan perubahan tata guna lahan menambah besar resiko yang terjadi.¹⁹

Banjir bandang adalah aliran massa sedimen (pasir, kerikil, batu dan air) dalam satu unit dengan kecepatan tinggi. Terjadi karena keseimbangan statik antara gaya geser yang ditimbulkan oleh aliran lebih besar dari gaya geser massa sedimen yang menahan. Karena massa yang mengalir ini mempunyai percepatan maka ketinggian dan kecepatannya akan selalu bertambah, dan pada tingkat batas tertentu keadaan menjadi tidak stabil sehingga massa sedimen terangkat dengan cepat yang menimbulkan banjir bandang.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas banjir bandang adalah atu jenis bencana hidrometeorologi yang terjadi secara tiba-tiba dengan debit air yang sangat besar

¹⁸ Kiki, K., & Faalih, I. S. (2020). *Uji Performa Southeastern Asia-Oceania Flash Flood Guidance Dalam Deteksi Kejadian Banjir Bandang Di Indonesia* (Periode Tanggal 23–30 Juli 2020). Jurnal Widya Climago, 2(2).

¹⁹ Nabila, A. D. S., Rahardjo, A. P., & Jayadi, R. *Analisis Karakteristik Hujan Penyebab Banjir Bandang di Wilayah Indonesia*.

²⁰ Utama, L., & Naumar, A. (2015). *Kajian kerentanan kawasan berpotensi banjir bandang dan mitigasi bencana pada daerah aliran sungai (DAS) Batang Kuranji Kota Padang*. Rekayasa Sipil, 9(1), 21-28.

dan kecepatan aliran yang tinggi. Banjir bandang umumnya disertai material sedimen seperti pasir, lumpur, kerikil, batu, serta kayu yang terbawa arus sehingga memiliki daya rusak yang tinggi terhadap permukiman, infrastruktur, dan lingkungan sekitar. Banjir bandang berbeda dengan banjir biasa karena memiliki waktu kejadian yang singkat dan sulit diprediksi. Karakteristik utama banjir bandang adalah waktu kejadian yang singkat, kecepatan aliran yang tinggi, serta dampak kerusakan yang luas, terutama di wilayah dengan topografi curam dan daerah aliran sungai yang sempit.

2.2.3. Faktor-Faktor Penyebab Banjir Bandang

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya banjir bandang adalah sebagai berikut:

1. Curah Hujan dengan Intensitas Tinggi

Curah hujan ekstrem dalam waktu singkat merupakan faktor utama penyebab banjir bandang. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan peningkatan debit air sungai secara cepat sehingga melampaui kapasitas sungai. Kondisi ini mengakibatkan air meluap dan mengalir dengan kecepatan tinggi ke wilayah yang lebih rendah, terutama di daerah hilir dan permukiman.

2. Kondisi Tanah yang Jenuh Air

Tanah yang telah jenuh air akibat hujan berkepanjangan kehilangan

kemampuan untuk menyerap air. Ketika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi, air akan langsung menjadi limpasan permukaan (runoff) dan mengalir ke sungai dalam waktu singkat. Kondisi tanah jenuh ini mempercepat terjadinya banjir bandang.

3. Topografi dan Morfologi Wilayah

Wilayah dengan topografi berbukit, lereng curam, serta berada di daerah hulu sungai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir bandang. Perbedaan ketinggian yang signifikan menyebabkan air hujan mengalir dengan kecepatan tinggi menuju daerah yang lebih rendah. Kabupaten Aceh Timur memiliki daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di wilayah perbukitan sehingga berpotensi mengalami banjir bandang.

4. Kerusakan Tutupan Lahan

Kerusakan tutupan lahan akibat deforestasi, pembukaan hutan, dan alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman atau pertanian mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan. Hilangnya vegetasi menyebabkan air hujan tidak tertahan oleh akar tanaman dan langsung mengalir ke sungai, sehingga meningkatkan volume dan kecepatan aliran air.

5. Longsoran di Hulu Sungai

Banjir bandang sering kali diawali oleh terjadinya longsor di bagian hulu sungai. Longsoran tersebut dapat membentuk bendungan alami yang

menahan aliran air sementara. Ketika bendungan alami tersebut jebol, air yang tertahan akan mengalir secara tiba-tiba dengan membawa material sedimen dalam jumlah besar dan menimbulkan banjir bandang.

6. Kapasitas Sungai dan Sistem Drainase yang Terbatas

Sungai yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau kurang terawat tidak mampu menampung volume air yang besar. Selain itu, sistem drainase yang tidak memadai memperparah genangan dan mempercepat luapan air ke permukiman warga. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir bandang, terutama saat terjadi hujan ekstrem.

7. Pengaruh Perubahan Iklim

Perubahan iklim berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan ekstrem. Pola curah hujan yang tidak menentu serta peningkatan kejadian cuaca ekstrem memperbesar potensi terjadinya banjir bandang, khususnya di wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti Provinsi Aceh.

8. Aktivitas Manusia di Daerah Aliran Sungai

Aktivitas manusia seperti pembangunan permukiman di bantaran sungai, penambangan material secara ilegal, serta pengelolaan daerah aliran sungai yang tidak berkelanjutan memperbesar kerentanan wilayah terhadap banjir bandang. Aktivitas tersebut mengganggu keseimbangan ekosistem

sungai dan meningkatkan dampak bencana terhadap masyarakat.²¹

2.3. Kerangka Berpikir



²¹ Balahanti, R., Mononimbar, W., & Gosal, P. H. (2023). *Kerentanan Banjir Di Kecamatan Singkil Kota Manado*. Jurnal spasial, 11(1), 69-79.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.²² Melakukan penelitian memerlukan adanya suatu metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh sebuah data yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai suatu fenomena atau peristiwa sosial dengan cara mendeskripsikannya secara rinci dan sistematis²³. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Untuk memperoleh data dan informasi secara langsung di lapangan yang menerapkan proses wawancara antara peneliti dengan sesuatu yang akan diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Akuntabilitas

²² Mulyadi, M. (2012). Riset desain dalam metodologi penelitian. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 16(1), 71-80.

²³ Juita, F., Effendi, M., & Maryam, S. (2025). Buku ajar mata kuliah metode penelitian kualitatif: Penelitian kualitatif untuk menilik berbagai fenomena sosial. Penerbit NEM.

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Timur.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan acuan asli dalam pengumpulan data, hal ini bertujuan agar data yang diperoleh tidak menyimpang dari keakuratan penelitian. Untuk mencapai hasil penelitian yang lebih mendalam, peneliti menggunakan pengukuran dan indikator sebagai kriteria untuk mendapatkan informasi pada Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Timur.

Tabel 3.1: Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator	Sumber
Akuntabilitas	1. Hukum dan kejujuran 2. Proses 3. Program 4. Kebijakan	Sheila Elwood (1993)

Sumber : Dari Jurnal Linda Widowati, 2024

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Badan Penangulangan Bencana Daerah Aceh Timur yang terletak di Jl. Seuneubok Teungoh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh 24415. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah BPBD Aceh

Timur merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur.

3.4. Sumber dan Bentuk Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yaitu :

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau responden. Data primer bisa didapatkan dari hasil wawancara langsung maupun wawancara tak langsung. Data primer pada penelitian ini didapatkan secara langsung oleh peneliti menggunakan hasil wawancara yang dilakukan dan didapat dari narasumber.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti menggunakan buku, jurnal, artikel, website pemerintah, media, dokumen dan hasil laporan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan topik yang sama

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebagai sebuah interaksi yang melibatkan antara peneliti dengan yang diwawancarai yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya. Wawancara pada penelitian ini untuk mengetahui Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Timur. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu menggunakan pedoman wawancara dan terbuka untuk pertanyaan lainnya agar mendapatkan jawaban yang lebih luas dan akurat.

3.5.2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami dan menganalisis Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir Bandang di Kabupaten Aceh Timur. Observasi dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur serta pada lokasi terdampak banjir bandang. Pengamatan secara langsung difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana, seperti proses penyaluran bantuan logistik dan sembako kepada masyarakat terdampak, pendistribusian bantuan darurat, koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana, pelaksanaan evakuasi dan pelayanan kepada korban, serta kondisi sarana dan prasarana

penanggulangan bencana yang digunakan. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan banjir bandang sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakannya.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola berbagai bahan tertulis, gambar, dokumen, maupun rekaman elektronik yang sesuai dengan topik penelitian untuk mendukung kegiatan penelitian.

3.6. Informan Penelitian

Tabel 2.3: Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur	1 Orang
	PLT. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur	1 Orang
	<i>Keuchik Gampong</i> Blang Senong	1 Orang
	Masyarakat terdampak	5 Orang
	Total	8 Orang

Sumber : Olahan Peneliti 2026

3.7. Keabsahan Data

Dalam mendapatkan keabsahan data, maka dalam penelitian dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data terlebih dahulu. Moleong menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk mengecek dan membandingkan data tersebut.²⁴ Triangulasi data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

3.7.1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari informan yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur, pemerintah kecamatan atau pemerintah desa di wilayah terdampak, serta masyarakat yang terdampak banjir bandang. Informasi yang diperoleh dari masing-masing informan kemudian dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian data mengenai akuntabilitas pemerintah dalam pasca penanganan banjir bandang. Selain itu, data hasil wawancara juga dikonfirmasi dengan dokumen resmi, seperti laporan kegiatan, laporan penyaluran bantuan, laporan pertanggungjawaban, serta peraturan yang berkaitan dengan penanganan pascabencana. Dengan membandingkan berbagai sumber tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih valid dan kredibel.

²⁴ Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-78.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah²⁵

3.8.1.Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis yang bertujuan mengklasifikasikan, mengarahkan, serta menyederhanakan data yang tidak relevan. Hasil reduksi ini kemudian diorganisasi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai hasil pengamatan, yang selanjutnya dijadikan tema utama dalam penelitian.

3.8.2. Penyajian Data

Penyajian data adalah bagian dari analisis yang menampilkan data dalam bentuk matriks, jaringan, peta, atau grafik. Dalam penelitian ini penyajian data disusun dalam bentuk tabel, diagram, gambar dan menjelaskan data dalam bentuk uraian tulisan.

3.8.3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan dengan memahami lebih mendalam tentang akuntabilitas pemerintah (BPBA) Kabupaten Aceh Timur dalam menanggulangi banjir bandang. Kemudian mengidentifikasi dari temuan yang didapat dan

²⁵ Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., & Rohidi, T. R. (1996). F. Analisis Data. Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah, 61.

memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan kontribusi terkait penanggulangan bencana banjir bandang di aceh timur.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur

Gambar 4.1 BPBD Aceh Timur



Sumber: Website BPBD Aceh Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur merupakan instansi pemerintah daerah yang memegang peran komando, koordinasi, dan pelaksana dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah seluas 6.040,60 Km² tersebut. Mengingat karakteristik geografis Aceh Timur yang sangat variatif mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan dan hutan lindung, wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir luapan sungai, tanah longsor, angin puting beliung, serta bahaya kebakaran pemukiman maupun hutan.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur, tugas pokok lembaga ini adalah

menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPBD Aceh Timur menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi prabencana dan pascabencana, serta pengaktifan fungsi komando darurat guna mengerahkan sumber daya manusia, logistik, dan peralatan secara cepat, tepat, dan akuntabel saat tanggap darurat terjadi di lapangan. Seluruh perumusan tugas dan fungsi teknis operasional ini bermuara pada pencapaian visi utama lembaga untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang tangguh, siaga, dan responsif dalam menghadapi risiko bencana. Guna mengimplementasikan visi tersebut, instansi ini mengemban misi strategis yang meliputi penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, peningkatan peran aktif dan kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, pembangunan sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, serta pemulihan pascabencana yang cepat melalui kedeputian tiga bidang utama teknis penunjang perlindungan masyarakat.

2. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur

Gambar 4.2 Dinas Sosial Aceh Timur



Sumber: Website Dinas Sosial Aceh Timur

1. Landasan Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Penunjang Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan masyarakat yang mengemban tugas pokok untuk membantu Bupati dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis operasional penanganan urusan sosial daerah. Implementasi tugas ini diwujudkan melalui fungsi strategis yang meliputi pengadministrasian pelayanan sosial, rehabilitasi kelompok rentan, pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil, penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta pengelolaan perlindungan jaminan sosial masa panik bagi korban bencana. Secara struktural, seluruh fungsi ini dijalankan oleh tiga kedeputian operasional, yaitu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Adanya pembagian kerja ini memastikan bahwa setiap jenis pelayanan wajib instansi—mulai dari penerbitan rekomendasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pendampingan hukum anak, hingga penyaluran Usaha Ekonomi Produktif (UEP)—dapat terlaksana secara terstruktur dan merata kepada seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Aceh Timur.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Kesejahteraan Sosial Daerah

Seluruh rangkaian program kerja kedinasan tersebut diarahkan demi mencapai visi besar organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang bermartabat, mandiri, inklusif, dan berkejahteraan sosial. Guna mentransformasikan visi tersebut ke dalam aksi nyata, Dinas Sosial menetapkan serangkaian misi strategis yang difokuskan pada peningkatan aksesibilitas kualitas jaring pengaman sosial dasar, penguatan profesionalisme aparatur serta pilar-pilar sosial seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta modernisasi basis data kemiskinan yang transparan. Melalui sinergi misi ini, tujuan akhir yang ingin dicapai oleh lembaga bukan sekadar menurunkan indeks kemiskinan makro daerah, melainkan juga memulihkan keberfungsian sosial para penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan korban konflik agar dapat kembali berdaya secara ekonomi dan sosial demi terciptanya ketahanan masyarakat yang berkeadilan di wilayah Aceh Timur.

4.2. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur, Keuchik Gampong Blang Seunong, serta masyarakat terdampak banjir bandang.

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas menurut Sheila Elwood yang terdiri dari empat indikator yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan berbagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur, mulai dari penyaluran bantuan logistik, proses evakuasi, pembangunan huntera dan huntap, hingga kendala koordinasi antarinstansi.

4.2.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dalam penelitian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Aceh Timur, khususnya BPBD, dalam melaksanakan penanganan pascabencana banjir bandang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas hukum dapat

dilihat dari kepatuhan terhadap dasar hukum, prosedur penanggulangan bencana, penggunaan anggaran dan bantuan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Pada penelitian ini, kejujuran diukur melalui keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi, kesesuaian data korban dan penerima bantuan dengan kondisi di lapangan, kesesuaian antara bantuan yang dilaporkan dengan bantuan yang disalurkan, serta keterbukaan dalam menyampaikan kendala atau ketidaksesuaian selama proses penanganan pascabencana. Pemerintah harus memastikan bahwa data penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan dan laporan penyaluran bantuan sesuai dengan jumlah serta jenis bantuan yang benar-benar diterima masyarakat. Kejujuran juga ditunjukkan dengan tidak melakukan manipulasi data, penyalahgunaan bantuan, maupun menyembunyikan informasi mengenai kendala dan kekurangan dalam proses penanganan bencana. Dengan akuntabilitas kejujuran dapat dilihat dari kesesuaian antara informasi, data, laporan, dan pelaksanaan penanganan bencana dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Aceh Timur, diketahui bahwa proses penyaluran bantuan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi penyalahgunaan bantuan. Pihak BPBD menjelaskan bahwa: “Pemerintah pusat mengawasi langsung proses penyaluran bantuan agar tidak

terjadi penyalahgunaan dan bantuan benar-benar tepat sasaran.”²⁶

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa BPBD Kabupaten Aceh Timur telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas hukum dan kejujuran melalui pengawasan distribusi bantuan. Keterlibatan pemerintah pusat dalam proses pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memastikan seluruh bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pengawasan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan bantuan yang dapat merugikan masyarakat terdampak.

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa penggunaan anggaran penanganan bencana harus mengikuti prosedur administrasi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap penggunaan dana harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jika terdapat dana yang tidak digunakan maka harus dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa pemerintah daerah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam penanganan bencana. Pengelolaan anggaran yang mengikuti prosedur administrasi menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah terhadap penggunaan dana publik sehingga dapat meminimalisir risiko penyimpangan

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

anggaran.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sekretaris Dinsos Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa bantuan yang masuk dari berbagai pihak dilakukan pendataan terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa:

“Seluruh bantuan yang masuk didata terlebih dahulu dan kemudian dilaporkan kembali setelah bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat terdampak.”²⁸

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa Dinas Sosial telah berupaya menjalankan akuntabilitas melalui sistem pendataan dan pelaporan bantuan. Pendataan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa bantuan yang masuk dan keluar dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat maupun pemerintah.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa keluhan mengenai penyaluran bantuan pada masa awal bencana. Masyarakat menyampaikan bahwa: “Bantuan dari pemerintah pada awal bencana dinilai lambat karena wilayah desa sulit dijangkau dan minim sarana evakuasi.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa masyarakat masih merasakan keterlambatan bantuan pada masa awal bencana. Kondisi tersebut

²⁸ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

²⁹ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak banjir tanggal 7 Mei 2026.

tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, akses jalan yang rusak, dan tingginya debit air yang menghambat proses distribusi bantuan.

Selain itu, salah satu masyarakat terdampak juga menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan secara merata. “Masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan karena bantuan diberikan secara bertahap sehingga masyarakat masih menunggu.”³⁰ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa proses pendataan masyarakat terdampak masih menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan. Perbedaan data dan proses verifikasi menyebabkan sebagian masyarakat harus menunggu lebih lama untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pengawasan penggunaan anggaran, pendataan bantuan, serta keterlibatan berbagai pihak dalam memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat. Namun demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan ketepatan pendataan dan percepatan distribusi bantuan agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih optimal.

³⁰ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak banjir tanggal 8 Mei 2026.

4.2.2. Akuntabilitas Proses

Menurut Sheila Elwood, akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah berjalan dengan baik, efektif, responsif, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

Akuntabilitas proses dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat melalui beberapa tahapan, yaitu proses evakuasi korban, distribusi bantuan, pelayanan pengungsian, koordinasi antarinstansi, dan pemulihan kondisi masyarakat. Proses evakuasi dinilai berdasarkan kecepatan, ketepatan, dan prosedur pemindahan korban menuju tempat yang aman. Distribusi bantuan dilihat dari proses pendataan penerima, ketepatan jenis dan jumlah bantuan, serta ketepatan waktu penyaluran. Pelayanan pengungsian dilihat dari kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan, sanitasi, dan keamanan masyarakat selama berada di pengungsian. Selanjutnya, koordinasi antarinstansi dilihat dari komunikasi, pembagian tugas, dan kerja sama antara BPBD dengan instansi serta pihak terkait. Sementara itu, proses pemulihan dilihat dari upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas yang rusak, memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta membantu masyarakat kembali menjalankan kegiatan-kegiatan setelah bencana.

Hasil temuan dengan pihak BPBD, diketahui bahwa proses penanganan banjir

bandang menghadapi berbagai kendala akibat kondisi geografis wilayah terdampak.

Beliau menjelaskan bahwa:

“Beberapa wilayah tidak dapat dilalui kendaraan karena tertutup lumpur dan material kayu. Bahkan ada desa yang seluruh rumahnya hanyut terbawa arus sehingga masyarakat harus direlokasi.”³¹

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa kondisi geografis menjadi salah satu tantangan terbesar dalam proses penanganan pascabencana banjir bandang. Kerusakan infrastruktur yang cukup parah menyebabkan proses evakuasi dan distribusi bantuan tidak dapat dilakukan secara normal. Pemerintah harus menyesuaikan metode pelayanan dengan kondisi lapangan yang ada.

Pihak BPBD juga menjelaskan bahwa untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, pemerintah menggunakan berbagai sarana transportasi darurat seperti helikopter, speedboat, serta tenaga manusia untuk mengangkut logistik. “Kami harus berjalan kaki sekitar 4 sampai 5 kilometer sambil membawa logistik karena kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi terdampak.”³²

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa BPBD tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan kondisi alam yang sulit. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat

³¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

³² Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

terdampak banjir.

Selain itu, Pihak BPBD menjelaskan bahwa proses penanganan bencana juga melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat keamanan. “Proses evakuasi dan distribusi bantuan dibantu oleh TNI dan kepolisian.”³³ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Keterlibatan TNI dan kepolisian membantu mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa koordinasi antarinstansi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses penanganan bencana. Tanpa adanya kerja sama antara BPBD, TNI, kepolisian, dan instansi lainnya, proses penanganan bencana akan berjalan lebih lambat.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinsos Aceh Timur menunjukkan bahwa pemerintah membentuk posko komando sebagai pusat koordinasi pelayanan bencana. Beliau menjelaskan bahwa: “Posko komando terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, BPS, Tagana, TKSK, TNI, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.”³⁴ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah berupaya menciptakan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam penanganan bencana. Posko komando berfungsi sebagai pusat informasi, pendataan korban, distribusi bantuan,

³³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

³⁴ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

serta koordinasi antarinstansi.

Sekretaris Dinsos Aceh Timur juga menjelaskan bahwa proses distribusi bantuan dilakukan berdasarkan laporan dari desa dan kecamatan.

“Bantuan disalurkan berdasarkan data yang disampaikan oleh desa dan kecamatan sehingga penyaluran dapat dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.”³⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menerapkan prosedur pelayanan yang sistematis dalam penyaluran bantuan. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Sekretaris Dinsos Aceh Timur menjelaskan bahwa bantuan tetap disalurkan meskipun kondisi di lapangan sangat sulit. “Bantuan logistik tetap disalurkan meskipun harus dilakukan pada dini hari.”³⁶ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa pemerintah berupaya menjaga kontinuitas pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi darurat. Kesiadaan petugas untuk bekerja pada waktu-waktu tertentu menunjukkan adanya komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Hasil temuan dengan Keuchik Gampong Blang Seunong, diketahui bahwa pemerintah telah berupaya membantu masyarakat selama masa bencana. Beliau menjelaskan bahwa:

³⁵ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

³⁶ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

“BPBD sudah maksimal dalam membantu masyarakat, baik melalui pendistribusian logistik maupun penyediaan speedboat untuk evakuasi warga. Kami dari pihak desa harus turun langsung ke kecamatan untuk mengambil bantuan logistik yang kemudian disalurkan kepada masyarakat.”³⁷

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah telah memberikan bantuan yang cukup signifikan kepada masyarakat terdampak. Keberadaan speedboat sangat membantu proses evakuasi warga ketika banjir mencapai ketinggian yang membahayakan. Selain itu, proses distribusi bantuan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pemerintah desa. Keterlibatan pemerintah desa membantu mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat terdampak menunjukkan adanya pandangan yang berbeda mengenai proses penanganan bencana. Beliau menyampaikan bahwa:

"Bantuan dari pemerintah sangat lambat dan tidak responsif pada awal bencana karena wilayah kami sulit dijangkau. Masyarakat tidak mengetahui harus mengungsi ke mana karena daerah tersebut jauh dari dataran tinggi sehingga sebagian besar warga mengungsi ke meunasah yang dianggap lebih aman.”³⁸

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat masih merasakan adanya keterlambatan bantuan pada masa awal bencana. Keterlambatan tersebut menyebabkan masyarakat harus bertahan dengan kemampuan sendiri sebelum

³⁷ Hasil wawancara dengan *Keuchik Gampong Blang Senong* tanggal 7 Mei 2026.

³⁸ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak tanggal 6 Mei 2026.

bantuan pemerintah tiba.

Masyarakat lainnya masyarakat juga menjelaskan bahwa bantuan darurat baru diterima beberapa hari setelah banjir terjadi. “Bantuan darurat baru datang beberapa hari kemudian karena kondisi banjir yang sangat deras dan sulit dijangkau oleh tim penanggulangan bencana.”³⁹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa proses distribusi bantuan masih dipengaruhi oleh faktor geografis dan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan petugas menjangkau seluruh wilayah secara cepat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas proses pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya proses evakuasi, pembentukan posko komando, distribusi bantuan logistik, serta koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas pelayanan, seperti kerusakan infrastruktur, akses jalan yang terputus, keterbatasan sarana transportasi, serta kondisi geografis wilayah terdampak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan, sarana pendukung kebencanaan, dan sistem koordinasi agar proses penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif pada masa yang akan datang.

³⁹ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak tanggal 6 Mei 2026.

4.2.3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program dalam penelitian ini diukur berdasarkan sejauh mana program penanganan pascabencana banjir bandang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mampu mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. Pengukuran dilakukan dengan melihat kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan program, ketepatan sasaran, manfaat yang diterima masyarakat, pencapaian tujuan program, kemampuan program dalam menyelesaikan permasalahan pascabencana, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dengan demikian, suatu program dapat dikatakan akuntabel apabila program yang direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan, diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, memberikan manfaat nyata, serta mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat bencana. adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui keberhasilan, kekurangan, dan perbaikan yang diperlukan dalam penanganan bencana berikutnya.

Program yang menjadi fokus meliputi bantuan logistik, pembangunan hunian sementara (hunlara), pembangunan hunian tetap (hunlap), bantuan jatah hidup, bantuan perlengkapan rumah tangga, dan program pemulihan masyarakat terdampak. Pengukuran akuntabilitas program dilakukan dengan melihat pelaksanaan program, ketepatan sasaran penerima, kesesuaian program dengan

kebutuhan masyarakat, manfaat yang dirasakan, serta kemampuan program dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat bencana. Akuntabilitas program dapat diketahui dari kesesuaian antara program yang direncanakan dengan pelaksanaannya serta sejauh mana program tersebut memberikan manfaat dan mencapai tujuan bagi masyarakat terdampak.

Hasil temuan dengan pihak BPBD Kabupaten Aceh Timur, diketahui bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program pemulihan pascabencana bagi masyarakat terdampak. Salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah adalah pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang.

Pihak BPBD menjelaskan bahwa:

“Saat ini pemerintah telah memasuki tahap pembangunan hunian tetap. Sebelumnya masyarakat ditempatkan di hunian sementara sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap selesai.”⁴⁰

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah berupaya memberikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, sedangkan pembangunan hunian tetap menjadi solusi permanen untuk memulihkan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

kehidupan masyarakat pascabencana.

Lebih lanjut, pihak BPBD menjelaskan bahwa pemerintah juga menyediakan lahan bagi masyarakat yang kehilangan tanah atau tidak memiliki lokasi untuk membangun rumah kembali. “Apabila masyarakat tidak memiliki tanah untuk pembangunan rumah, maka pemerintah akan menyediakan lahan untuk pembangunan hunian tetap.”⁴¹

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak. Penyediaan lahan menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga melaksanakan program rehabilitasi lingkungan pascabencana. Beliau menjelaskan bahwa:

“Saat ini masih terdapat banyak material lumpur dan kayu yang menutupi jalan serta kawasan permukiman sehingga proses rehabilitasi membutuhkan waktu yang cukup lama.”⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program rehabilitasi lingkungan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana. Kondisi lingkungan yang masih dipenuhi material banjir menyebabkan masyarakat belum dapat

⁴¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

⁴² Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

sepenuhnya kembali menjalankan aktivitas seperti sebelum bencana terjadi.

Hasil temuan dengan Sekretaris Dinsos Kabupaten Aceh Timur, diketahui bahwa pemerintah tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tinggal di huntera.

Sekretaris Dinsos Aceh Timur menjelaskan bahwa: "Pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga di huntera seperti kompor, peralatan memasak, perlengkapan tidur, dan kebutuhan dasar lainnya."⁴³ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa program bantuan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan.

Sekretaris Dinsos Aceh Timur juga menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan jatah hidup kepada masyarakat terdampak. "Masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan jatah hidup sebesar Rp15.000 per jiwa per hari sesuai ketentuan yang berlaku."⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa program jatah hidup merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masyarakat belum dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

Selain itu, Sekretaris Dinsos Aceh Timur menjelaskan bahwa bantuan logistik

⁴³ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

yang diterima dari pemerintah pusat maupun pihak lain juga didistribusikan kepada masyarakat terdampak melalui sistem yang terorganisir. “Bantuan yang berasal dari pemerintah pusat maupun masyarakat didata terlebih dahulu kemudian disalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan.”⁴⁵ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program bantuan sosial dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur untuk memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Hasil wawancara dengan Keuchik menunjukkan bahwa program-program pemerintah cukup membantu masyarakat dalam menghadapi dampak banjir bandang. Beliau menjelaskan bahwa: “BPBD dan pemerintah daerah sudah semaksimal mungkin membantu masyarakat, baik melalui bantuan logistik maupun bantuan evakuasi.”⁴⁶

Menurut Keuchik, program bantuan yang diberikan pemerintah mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat. Bantuan tersebut sangat penting karena sebagian besar masyarakat kehilangan akses terhadap bahan makanan dan kebutuhan pokok akibat banjir. Selain itu, Keuchik juga menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berada di lokasi pengungsian. “Masyarakat yang mengungsi mendapatkan bantuan kebutuhan pokok selama berada di lokasi pengungsian.”⁴⁷

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan *Keuchik Gampong* Blang Senong tanggal 7 Mei 2026.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan *Keuchik Gampong* Blang Senong tanggal 7 Mei 2026.

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa program pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelamatan korban, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat selama masa pengungsian. Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan masih menghadapi beberapa kendala. Masyarakat menjelaskan bahwa: “Masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan karena proses bantuan dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat harus menunggu.”⁴⁸

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan program adalah proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa belum memperoleh bantuan secara merata.

Selain itu, masyarakat juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun rumah bantuan bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah berat akibat banjir bandang. “Pemerintah telah membangun delapan unit rumah bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dihuni kembali.”⁴⁹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program pemulihan perumahan telah mulai dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pascabencana.

Sementara itu, masyarakat menjelaskan bahwa pada awal bencana masyarakat

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak tanggal 6 Mei 2026.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak banjir tanggal 7 Mei 2026.

lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah desa dan swadaya masyarakat.

“Pada awal bencana bantuan yang diterima masyarakat masih sangat terbatas sehingga masyarakat lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah desa dan bantuan sesama warga.”⁵⁰

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa meskipun program bantuan pemerintah telah berjalan, masyarakat masih merasakan adanya keterlambatan pada tahap awal pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesiapan logistik dan sistem distribusi bantuan agar program dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat terdampak.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah. “Masyarakat berharap pemerintah menambah jumlah kapal karet dan memperbanyak personel yang terlibat dalam penanganan bencana.”⁵¹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan peningkatan kualitas program kebencanaan, khususnya dalam aspek evakuasi dan pelayanan darurat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas program pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai program yang telah dilaksanakan seperti bantuan logistik, bantuan jatah hidup, pembangunan huntara, pembangunan huntap, rehabilitasi lingkungan, serta pembangunan rumah bantuan bagi masyarakat terdampak. Namun demikian, masih

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak banjir tanggal 7 Mei 2026.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak banjir tanggal 7 Mei 2026.

terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan distribusi bantuan, permasalahan pendataan penerima bantuan, serta keterbatasan sarana pendukung yang menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan agar tujuan pemulihan pascabencana dapat tercapai secara maksimal.

4.2.4 Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan dan kebijakan yang dibuat serta dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Berbeda dengan akuntabilitas hukum yang menekankan pada kepatuhan pemerintah terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, akuntabilitas kebijakan lebih menekankan pada ketepatan kebijakan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan kebijakan, manfaat yang diberikan, serta pencapaian tujuan kebijakan. Dalam konteks penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur, akuntabilitas kebijakan dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah, seperti kebijakan tanggap darurat, penyaluran bantuan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengukuran dilakukan dengan melihat dasar dan tujuan kebijakan, kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan di lapangan, manfaat yang diterima masyarakat, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh

bencana. Contohnya Apa dari kebijakan pembangunan huntap memang dibutuhkan masyarakat, tepat sasaran, memberikan manfaat, dan mampu menyelesaikan masalah masyarakat yang kehilangan rumah.

Hasil temuan dengan pihak BPBD Kabupaten Aceh Timur, diketahui bahwa pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang berorientasi pada penyelamatan dan pemulihan masyarakat terdampak. Beliau menjelaskan bahwa:

"Prioritas utama pemerintah adalah keselamatan masyarakat. Karena itu, pada tahap awal kami lebih fokus kepada masyarakat terdampak terlebih dahulu sebelum memikirkan pembangunan fasilitas yang rusak."⁵²

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah pada masa tanggap darurat lebih diarahkan pada penyelamatan korban, penyediaan bantuan kebutuhan dasar, dan penanganan pengungsi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana.

Lebih lanjut, pihak BPBD menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengambil berbagai kebijakan penanganan pascabencana.

“Dalam pelaksanaan penanganan bencana kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.”⁵³

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan sumber daya, pendanaan, serta arahan teknis dalam melaksanakan program pemulihan pascabencana.

Selain itu, pihak BPBD menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan relokasi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat risiko tinggi. “Beberapa masyarakat yang terdampak parah harus direlokasi karena lokasi tempat tinggal sebelumnya sudah tidak aman untuk dihuni kembali.”⁵⁴ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan relokasi dilakukan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat agar tidak kembali menghadapi risiko bencana yang sama di masa mendatang.

Hasil temuan dengan Sekretaris Dinsos Aceh Timur selaku pihak Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur, diketahui bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan penanganan bencana melalui kerja sama lintas sektor. Beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam penanganan banjir bandang semua pihak terlibat, mulai dari BPBD, Dinas Sosial, TNI, kepolisian, Tagana, TKSK, pemerintah kecamatan, hingga

⁵³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

pemerintah desa.”⁵⁵

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah menerapkan kebijakan kolaboratif dalam penanganan bencana. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat melalui keterlibatan berbagai pihak yang memiliki tugas dan fungsi berbeda.

Sekretaris Dinsos Aceh Timur juga menjelaskan bahwa pemerintah membentuk Posko Komando sebagai pusat koordinasi seluruh kegiatan penanganan bencana. “Posko Komando dibentuk untuk memudahkan koordinasi, pendataan masyarakat, penyaluran bantuan, dan pelayanan pengaduan masyarakat.”⁵⁶

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa pembentukan Posko Komando merupakan salah satu bentuk kebijakan yang mendukung koordinasi antarinstansi. Melalui posko tersebut, pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai informasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Selain itu, Sekretaris Dinsos Aceh Timur menjelaskan bahwa pemerintah juga menerapkan kebijakan pemberian bantuan jatah hidup kepada masyarakat terdampak. “Pemerintah memberikan bantuan jatah hidup kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk dukungan selama masa pemulihan.”⁵⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

pemulihan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Hasil temuan dengan Keuchik, diketahui bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan berbagai kebijakan yang membantu masyarakat selama masa bencana. Beliau menjelaskan bahwa:

“Menurut saya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat. Bantuan logistik, evakuasi, dan pelayanan kepada masyarakat tetap diberikan meskipun kondisi saat itu sangat sulit.”⁵⁸

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa menilai kebijakan yang diambil pemerintah daerah cukup membantu masyarakat terdampak. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir bandang.

Keuchik juga menjelaskan bahwa pemerintah desa turut dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan. “Pemerintah desa ikut terlibat dalam pendataan korban, distribusi bantuan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.”⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa pelibatan pemerintah desa menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penanganan bencana. Pemerintah desa memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.

Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa

⁵⁸ Hasil wawancara dengan *Keuchik Gampong Blang Senong* tanggal 7 Mei 2026.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan *Keuchik Gampong Blang Senong* tanggal 7 Mei 2026.

masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi kebijakan pemerintah. Salah satu masyarakat menjelaskan bahwa: “Pada awal kejadian masyarakat merasa bantuan dari pemerintah masih lambat sehingga masyarakat harus bertahan dengan kemampuan sendiri.”⁶⁰

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa meskipun kebijakan pemerintah telah dirancang untuk membantu masyarakat, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Keterlambatan bantuan menyebabkan masyarakat harus mencari solusi sendiri untuk memenuhi kebutuhan selama masa awal bencana.

Masyarakat juga menyampaikan harapannya terhadap kebijakan pemerintah di masa yang akan datang. “Pemerintah perlu menambah jumlah kapal karet dan personel yang terlibat dalam penanganan bencana agar bantuan dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat.”⁶¹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana, khususnya pada aspek kesiapsiagaan dan pelayanan darurat.

Sementara itu, masyarakat menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme bantuan yang diterapkan pemerintah. “Sebagian masyarakat masih bingung karena bantuan diberikan secara bertahap sehingga mereka belum mengetahui kapan bantuan akan diterima.”⁶² Berdasarkan hasil

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak tanggal 6 Mei 2026.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak banjir tanggal 7 Mei 2026.

⁶² Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak tanggal 8 Mei 2026.

wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kurangnya informasi mengenai tahapan bantuan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Selain itu, masyarakat menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan rumah bantuan telah membantu sebagian masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. “Rumah bantuan yang dibangun pemerintah sangat membantu masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat banjir.”⁶³ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kebijakan pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, pemberian bantuan sosial, pembentukan Posko Komando, serta pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan, seperti keterlambatan distribusi bantuan, keterbatasan sarana pendukung, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat

⁶³ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak tanggal 6 Mei 2026.

yang lebih optimal bagi masyarakat terdampak banjir bandang.

4.2.5 Faktor-faktor yang Menghambat Koordinasi Pertanggungjawaban Penanganan Banjir Bandang di Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat koordinasi pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari internal pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada proses evakuasi, distribusi bantuan, pendataan korban, hingga pelaksanaan program pemulihan pascabencana.

1. Kerusakan Infrastruktur dan Sulitnya Akses Menuju Lokasi Terdampak

Salah satu faktor utama yang menghambat koordinasi penanganan banjir bandang adalah kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Banjir bandang menyebabkan jalan, jembatan, dan akses transportasi menuju wilayah terdampak mengalami kerusakan sehingga menyulitkan pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Hasil temuan dengan pihak BPBD Kabupaten Aceh Timur, dijelaskan bahwa:

“Beberapa wilayah tidak dapat dilalui kendaraan karena tertutup lumpur dan material kayu. Bahkan ada desa yang seluruh rumahnya hanyut sehingga

masyarakat harus direlokasi.”⁶⁴

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa kondisi infrastruktur yang rusak menjadi hambatan utama dalam proses penyaluran bantuan. Kerusakan jalan menyebabkan kendaraan tidak dapat masuk ke lokasi terdampak sehingga bantuan harus dibawa menggunakan sarana alternatif atau bahkan dipikul secara manual oleh petugas.

Hal serupa juga disampaikan oleh Keuchik yang menyatakan bahwa:

“Akses menuju desa dipenuhi lumpur sehingga kendaraan tidak dapat masuk. Kami dari pihak desa harus turun langsung ke kecamatan untuk mengambil bantuan logistik.”⁶⁵

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa kerusakan infrastruktur menyebabkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi lebih sulit. Akibatnya, distribusi bantuan kepada masyarakat memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan kondisi normal.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Selain kerusakan infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam penanganan banjir bandang. Sarana seperti kapal karet, speedboat, alat komunikasi, dan kendaraan operasional memiliki peran penting dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan.

Hasil temuan dengan masyarakat terdampak, diketahui bahwa masyarakat

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan *Keuchik Gampong* Blang Senong tanggal 7 Mei 2026.

menilai sarana evakuasi yang tersedia masih terbatas. “Pada saat banjir terjadi, bantuan seperti kapal karet belum tersedia di desa kami sehingga masyarakat harus menyelamatkan diri dengan kemampuan sendiri.”⁶⁶

Hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa keterbatasan sarana evakuasi menjadi salah satu penyebab lambatnya proses penyelamatan masyarakat pada masa awal bencana. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus mengandalkan bantuan dari sesama warga sebelum bantuan pemerintah tiba.

Sementara itu, pihak BPBD menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya menggunakan berbagai sarana yang tersedia untuk menjangkau masyarakat terdampak. “Kami menggunakan speedboat, kendaraan operasional, bahkan berjalan kaki untuk menjangkau lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan.”⁶⁷

Hasil temuan tersebut dapat dianalisis bahwa pemerintah telah berusaha memaksimalkan sarana yang tersedia. Namun demikian, luasnya wilayah terdampak menyebabkan kebutuhan sarana penanggulangan bencana menjadi lebih besar dibandingkan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah.

3. Permasalahan Pendataan Korban dan Penerima Bantuan

Faktor lain yang menghambat koordinasi pertanggungjawaban pemerintah adalah permasalahan pendataan korban dan penerima bantuan. Pendataan menjadi

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak tanggal 8 Mei 2026.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

bagian penting dalam penyaluran bantuan karena menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.

Hasil temuan dengan Sekretaris Dinsos Aceh Timur selaku pihak Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur, dijelaskan bahwa seluruh bantuan harus disalurkan berdasarkan data yang telah diverifikasi. “Data penerima bantuan harus diverifikasi terlebih dahulu agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.”⁶⁸ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Namun, proses verifikasi data membutuhkan waktu sehingga dapat memperlambat penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa: “Masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan karena proses bantuan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan hasil pendataan.”⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa proses pendataan dan verifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama menjadi salah satu faktor yang menghambat distribusi bantuan. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa bantuan belum diberikan secara merata.

4. Kondisi Cuaca dan Lingkungan Pascabencana

Faktor berikutnya yang menghambat koordinasi penanganan bencana adalah

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Aceh Timur tanggal 7 Mei 2026.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak banjir tanggal 7 Mei 2026.

kondisi cuaca dan lingkungan pascabencana. Tingginya curah hujan, tumpukan lumpur, serta material kayu yang terbawa arus menyebabkan proses penanganan bencana menjadi lebih sulit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik, dijelaskan bahwa: “Banyak material kayu dan lumpur yang menutupi jalan sehingga akses menuju desa menjadi sangat sulit.”⁷⁰

Selain itu, pihak BPBD juga menjelaskan bahwa: “Proses pembersihan lingkungan membutuhkan waktu yang cukup lama karena material yang terbawa banjir sangat banyak.”⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa kondisi lingkungan pascabencana menjadi hambatan dalam proses pemulihan. Selain menghambat distribusi bantuan, kondisi tersebut juga memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Bantuan

Faktor terakhir yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme bantuan yang diterapkan pemerintah. Sebagian masyarakat belum memahami tahapan pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sehingga menimbulkan persepsi bahwa bantuan tidak diberikan secara merata.

Hasil temuan dengan masyarakat, diketahui bahwa: “Sebagian masyarakat

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak banjir tanggal 7 Mei 2026.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Timur tanggal 6 Mei 2026.

masih bingung karena bantuan diberikan secara bertahap sehingga mereka belum mengetahui kapan bantuan akan diterima.”⁷² Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai mekanisme bantuan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat dapat menyebabkan munculnya kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat agar setiap tahapan penyaluran bantuan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat terdampak. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat koordinasi pertanggungjawaban penanganan banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur meliputi kerusakan infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana, permasalahan pendataan korban, kondisi lingkungan pascabencana, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme bantuan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses koordinasi, distribusi bantuan, dan pelaksanaan program pemulihan belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sarana penanggulangan bencana yang memadai, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar penanganan bencana di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

⁷² Hasil wawancara dengan Masyarakat terdampak tanggal 6 Mei 2026.

4.3. Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan berbagai bentuk penanganan pascabencana, antara lain penyaluran bantuan logistik, evakuasi masyarakat, pembentukan Posko Komando, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, pelaksanaan akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan keterlambatan distribusi bantuan, permasalahan pendataan penerima bantuan, keterbatasan sarana dan prasarana, kerusakan infrastruktur, serta kesulitan akses menuju beberapa wilayah terdampak.

Menurut Sheila Elwood, akuntabilitas hukum dan kejujuran berkaitan dengan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang berlaku serta penggunaan sumber daya publik secara bertanggung jawab. Dalam penelitian ini, akuntabilitas hukum dan kejujuran dapat dilihat melalui kepatuhan terhadap prosedur penanganan bencana, pengawasan penggunaan anggaran, pendataan penerima bantuan, pelaporan bantuan, serta keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Aceh Timur, khususnya BPBD dan Dinas Sosial, telah berupaya menjalankan tanggung jawab tersebut. Penggunaan dana penanganan bencana dilakukan berdasarkan prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Selain itu, proses penyaluran bantuan juga

mendapatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari aspek kejujuran, pemerintah juga melakukan pendataan dan pelaporan terhadap bantuan yang diterima dan disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan bantuan. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang merasa bantuan belum diterima secara merata. Kondisi tersebut berkaitan dengan proses pendataan dan verifikasi yang membutuhkan waktu serta kondisi geografis yang menyulitkan distribusi bantuan.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran telah dilaksanakan dengan cukup baik, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap prosedur, pengawasan bantuan, dan pelaporan. Akan tetapi, aspek tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan validitas data dan transparansi informasi agar tidak menimbulkan kesenjangan antara data administrasi dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Akuntabilitas proses berkaitan dengan bagaimana pemerintah melaksanakan prosedur dan mekanisme pelayanan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Menurut Sheila Elwood, proses yang akuntabel ditunjukkan melalui pelayanan yang cepat, responsif, dan sesuai dengan prosedur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah membentuk Posko Komando dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak,

seperti TNI, kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Dinas Sosial. Pemerintah juga menggunakan sarana seperti speedboat dan kendaraan operasional untuk menjangkau wilayah yang terdampak dan sulit diakses. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan proses penanganan yang terkoordinasi dan responsif.

Dari sisi masyarakat masih ditemukan permasalahan berupa keterlambatan bantuan pada tahap awal bencana. Kondisi tersebut terjadi karena kerusakan jalan, akses yang terputus, kondisi geografis, serta keterbatasan sarana transportasi. Masyarakat menyampaikan bahwa bantuan darurat baru diterima beberapa hari setelah banjir karena kondisi wilayah yang sulit dijangkau.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan prosedur dan koordinasi belum secara otomatis menghasilkan pelayanan yang cepat. Dalam perspektif akuntabilitas proses, pemerintah tidak hanya dituntut memiliki mekanisme penanganan, tetapi juga harus mampu memastikan mekanisme tersebut berjalan efektif di lapangan.

Akuntabilitas proses telah berjalan cukup baik tetapi belum optimal. Pemerintah telah memiliki mekanisme evakuasi, posko, distribusi bantuan, dan koordinasi lintas sektor, tetapi masih perlu meningkatkan kesiapsiagaan, sarana transportasi, sistem komunikasi, dan kecepatan respons agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat.

Akuntabilitas program berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa program yang telah direncanakan dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, program yang dianalisis meliputi bantuan logistik, bantuan jatah hidup, bantuan perlengkapan rumah tangga, pembangunan hunian sementara, pembangunan hunian tetap, serta program pemulihan masyarakat terdampak.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Pada tahap awal, pemerintah memberikan bantuan logistik dan kebutuhan dasar. Selanjutnya, pemerintah melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Skripsi harus ubah.docx

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah desa menilai program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah kehilangan tempat tinggal. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti keterlambatan bantuan, keterbatasan sarana pendukung, dan permasalahan pendataan penerima bantuan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan pemerintah, tetapi juga dari ketepatan sasaran,

ketepatan waktu, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemampuan program dalam menyelesaikan permasalahan pascabencana.

Akuntabilitas program telah berjalan cukup baik, karena program pemulihan telah dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Namun, efektivitas dan pemerataan manfaat masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan pendataan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program secara berkelanjutan.

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang akuntabel harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menetapkan berbagai kebijakan dalam penanganan pascabencana, antara lain kebijakan tanggap darurat, penyaluran bantuan sosial, relokasi masyarakat, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan dan pemulihan kepada masyarakat terdampak.

Kebijakan pemerintah juga menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD, pemerintah pada tahap awal lebih memprioritaskan keselamatan masyarakat terdampak sebelum

melaksanakan pembangunan fasilitas yang mengalami kerusakan.

Dari sisi manfaat, masyarakat mengakui bahwa pembangunan rumah bantuan telah membantu masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat banjir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi telah memberikan manfaat nyata kepada sebagian masyarakat terdampak.

Masih terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan, terutama keterlambatan distribusi bantuan dan kurangnya informasi mengenai mekanisme bantuan. Artinya, kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pada dasarnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan di lapangan.

Akuntabilitas kebijakan pemerintah telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi, keterbukaan informasi, evaluasi kebijakan, dan koordinasi dengan masyarakat agar kebijakan yang dibuat tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan akuntabilitas dalam penanganan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur. Hambatan tersebut meliputi kerusakan infrastruktur dan akses jalan, keterbatasan sarana dan prasarana, permasalahan pendataan korban dan penerima bantuan, kondisi lingkungan pascabencana, serta kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai mekanisme bantuan. Kerusakan jalan dan jembatan menyebabkan akses menuju beberapa wilayah terdampak menjadi sulit. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi kecepatan distribusi bantuan dan koordinasi antarinstansi.

Permasalahan lainnya adalah pendataan korban dan penerima bantuan. Proses verifikasi data membutuhkan waktu sehingga berpotensi memperlambat distribusi bantuan. Sebagian masyarakat juga belum memahami bahwa bantuan diberikan secara bertahap berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa bantuan pemerintah tidak merata.

Kondisi lingkungan pascabencana berupa lumpur, material kayu, dan kerusakan lingkungan turut memperlambat proses distribusi bantuan serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, hambatan akuntabilitas tidak hanya berasal dari internal pemerintah, tetapi juga dipengaruhi kondisi geografis, kerusakan akibat bencana, keterbatasan sumber daya, dan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan empat indikator Sheila Elwood, dapat diketahui bahwa akuntabilitas pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam penanganan pascabencana banjir bandang telah dilaksanakan dengan cukup baik, tetapi belum optimal. Pada aspek hukum dan kejujuran, pemerintah telah melakukan pengawasan, pendataan, dan pelaporan. Pada aspek proses, pemerintah telah membentuk Posko Komando, melakukan evakuasi, distribusi bantuan, dan koordinasi lintas sektor. Pada aspek

program, pemerintah telah melaksanakan bantuan logistik, pembangunan huntera dan hunta, serta program pemulihan. Sedangkan pada aspek kebijakan, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan dan pemulihan masyarakat. Namun, pelaksanaan keempat aspek tersebut masih menghadapi kendala berupa keterlambatan distribusi bantuan, ketidakakuratan atau keterlambatan pendataan, keterbatasan sarana dan prasarana, kerusakan infrastruktur, kondisi lingkungan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah bukan berarti seluruh pelaksanaan telah sempurna, tetapi pemerintah telah menjalankan bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sementara efektivitas pelaksanaannya masih perlu diperbaiki. Penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya, penyediaan sarana kebencanaan, pembaruan sistem pendataan, serta peningkatan komunikasi dengan masyarakat menjadi hal penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penanganan pascabencana di Kabupaten Aceh Timur.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan akuntabilitas dalam penanganan pascabencana banjir bandang melalui aspek hukum dan kejujuran, proses, program, serta kebijakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pengawasan penggunaan anggaran dan bantuan, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, pembentukan Posko Komando, pelaksanaan program bantuan sosial, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Dalam pelaksanaan akuntabilitas tersebut belum optimal, karena masih dipengaruhi oleh berbagai kondisi di lapangan yang menyebabkan pelayanan dan penanganan kepada masyarakat belum dapat berjalan secara maksimal.
2. Faktor-faktor yang menghambat koordinasi pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan banjir bandang di Kabupaten Aceh Timur meliputi permasalahan infrastruktur dan akses jalan, keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan, kondisi medan wilayah terdampak, kondisi

cuaca dan lingkungan pascabencana, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan pemerintah. Kerusakan infrastruktur dan sulitnya akses jalan menghambat mobilitas petugas dan distribusi bantuan. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, speedboat, kapal karet, dan alat komunikasi juga membatasi kemampuan pemerintah dalam menjangkau wilayah terdampak. Selain itu, kondisi medan yang sulit, cuaca yang tidak mendukung, serta lumpur dan material yang menutupi akses jalan semakin memperlambat proses penanganan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pemberian bantuan.

5.2 Saran

1. BPBD dan Dinas Sosial perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi serta memperbaiki sistem pendataan korban agar bantuan dapat disalurkan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
2. BPBD dan Dinas Sosial perlu menambah sarana dan prasarana kebencanaan, seperti kapal karet, speedboat, dan alat komunikasi darurat untuk mendukung penanganan bencana.
3. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan dan prosedur penanganan bencana agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam proses penyaluran bantuan.

4. Masyarakat gampong Beuringen diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal:

Alda, M. P. (2025). *Analisis Pemetaan Daerah Potensi Rawan Banjir di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*.

Balahanti, R., Mononimbar, W., & Gosal, P. H. (2023). *Kerentanan Banjir Di Kecamatan Singkil Kota Manado*. Jurnal spasial, 11(1), 69-79.

Bill CR dkk, *Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkuan*, Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Usrat, 2018, hlm. 4

Ginting, S. (2021). *Analisis curah hujan penyebab banjir bandang di ujung berung, bandung*. Akselerasi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 2(2).

Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. Jurnal Genta Mulia, 15(2), 70-78.

Juita, F., Effendi, M., & Maryam, S. (2025). Buku ajar mata kuliah metode penelitian kualitatif: Penelitian kualitatif untuk menilik berbagai fenomena sosial. Penerbit NEM.

Jurnal Karkasa et al., “Pemetaan Resiko Banjir Menggunakan Citra Satelit (Studi Kasus: Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) Rika Nuraini” 8, no. 2 (2022).

Kiki, K., & Faalih, I. S. (2020). *Uji Performa Southeastern Asia-Oceania Flash Flood Guidance Dalam Deteksi Kejadian Banjir Bandang Di Indonesia* (Periode Tanggal 23–30 Juli 2020). *Jurnal Widya Climago*, 2(2).

Kusumo, P., & Nursari, E. (2016). *Zonasi tingkat kerawanan banjir dengan sistem informasi geografis pada DAS Cidurian Kab. Serang, Banten. STRING* (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi), 1(1).

Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., & Rohidi, T. R. (1996). *F. Analisis Data. Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah*, 61.

Mulyadi, M. (2012). *Riset desain dalam metodologi penelitian. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71-80.

Nabila, A. D. S., Rahardjo, A. P., & Jayadi, R. *Analisis Karakteristik Hujan Penyebab Banjir Bandang di Wilayah Indonesia*.

Raba Manggaukang, *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers), 2006, hal. 37

Rahmadhani, R. (2023). *Strategi dan program pencegahan banjir di Indonesia*. Researchgate. Net, May.

Rahmi Inayati and Muhammad Ikram Mullah, “Penanggulangan Bencana Banjir Di Aceh: Psikologis Dan Strategi Efektif” 1, no. 2 (2022).

Siti Jamilah Said, *Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Makassar*, 2020 Diakses dari

<http://journal.unismuh.ac.id>, Pada Tanggal 10 Januari 2023 Pukul 19:58

WIB

Sumarsono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.

15.

Utama, L., & Naumar, A. (2015). *Kajian kerentanan kawasan berpotensi banjir bandang dan mitigasi bencana pada daerah aliran sungai (DAS) Batang Kuranji Kota Padang*. *Rekayasa Sipil*, 9(1), 21-28.

Qori Febriarta, “Responsivitas Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat (Studi Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat)” (2024).

Regulasi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana.

Website:

Arn. “Media Asing Soroti Kegagalan Penanganan Banjir Bandang dan Longsor Aceh”. (Dialeksis: 2025). Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Definisi dan Jenis Banjir*,

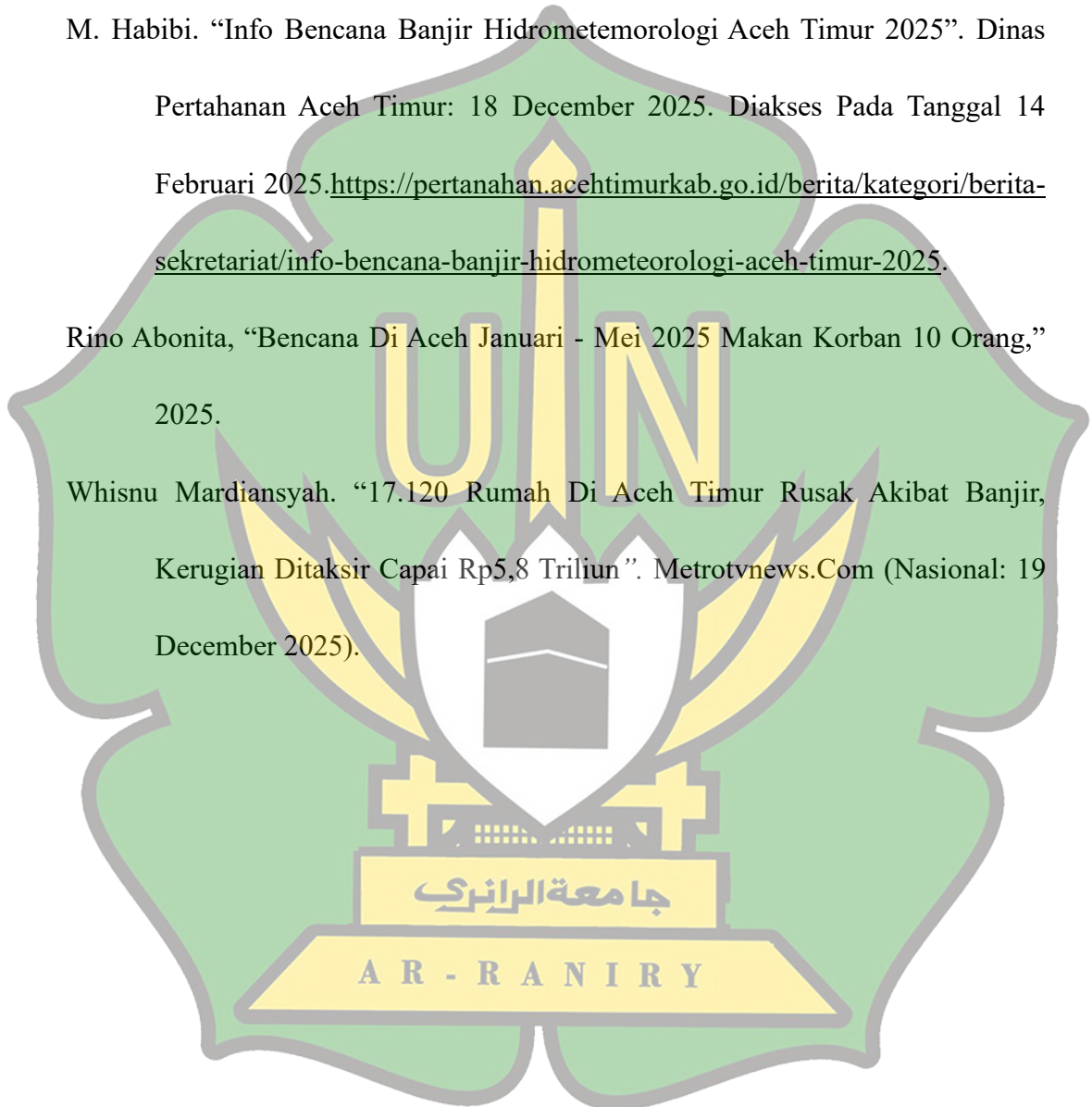
<https://www.bnpb.go.id/>

BNPB, “Alam, Ingat!!! Banjir Tidak Sepenuhnya Bencana Yang Disebabkan Kondisi” (2021).

M. Habibi. “Info Bencana Banjir Hidrometeorologi Aceh Timur 2025”. Dinas
Pertahanan Aceh Timur: 18 December 2025. Diakses Pada Tanggal 14
Februari 2025. [https://pertanahan.acehtimurkab.go.id/berita/kategori/berita-
sekretariat/info-bencana-banjir-hidrometeorologi-aceh-timur-2025](https://pertanahan.acehtimurkab.go.id/berita/kategori/berita-sekretariat/info-bencana-banjir-hidrometeorologi-aceh-timur-2025).

Rino Abonita, “Bencana Di Aceh Januari - Mei 2025 Makan Korban 10 Orang,”
2025.

Whisnu Mardiansyah. “17.120 Rumah Di Aceh Timur Rusak Akibat Banjir,
Kerugian Ditaksir Capai Rp5,8 Triliun”. Metrotvnews.Com (Nasional: 19
December 2025).



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dimensi Penelitian	Indikator Penelitian	Pertanyaan Penelitian
Akuntabilitas	Hukum dan kejujuran	1) Bagaimana bentuk tanggung jawab BPBD dalam penanganan pascabencana banjir bandang? 2) Bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan anggaran dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat? 3) Bagaimana BPBD memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran? 4) Apa bentuk pertanggungjawaban BPBD kepada pemerintah dan masyarakat? 5) Kendala apa yang dihadapi dalam menjaga transparansi penanganan bencana?
	Proses	1) Bagaimana proses evakuasi masyarakat saat banjir bandang terjadi? 2) Bagaimana proses distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak? 3) Bagaimana koordinasi BPBD dengan instansi lain dalam penanganan bencana? 4) Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penanganan banjir bandang?
	Program	1) Program apa saja yang dilaksanakan BPBD dalam penanganan pascabencana? 2) Bagaimana pelaksanaan program hunian sementara dan hunian tetap bagi korban?

		3) Apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 4) Bagaimana evaluasi BPBD terhadap program yang telah dilaksanakan? 5) Apa hambatan pelaksanaan program?
	Kebijakan	1) Kebijakan apa yang diambil pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang? 2) Bagaimana proses pengambilan kebijakan tersebut? 3) Apakah kebijakan yang diambil telah sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak? 4) Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan? 5) Apa rekomendasi BPBD untuk perbaikan kebijakan?

2. PLT. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur

DIMENSI PENELITIAN	INDIKATOR PENELITIAN	PERTANYAAN PENELITIAN
Akuntabilitas	Hukum dan kejujuran	1) Bagaimana mekanisme pendataan bantuan yang masuk dan keluar? 2) Bagaimana Dinas Sosial memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak? 3) Bagaimana bentuk pelaporan bantuan yang dilakukan Dinas Sosial? 4) Apa kendala dalam menjaga transparansi?

	Proses	1) Bagaimana proses distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak? 2) Bagaimana peran Posko Komando dalam penanganan bencana? 3) Bagaimana koordinasi Dinas Sosial dengan BPBD dan instansi lainnya? 4) Apa kendala selama penyaluran bantuan?
	Program	1) Program bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat terdampak? 2) Bagaimana pelaksanaan bantuan jatah hidup bagi korban? 3) Apakah program yang diberikan telah membantu masyarakat? 4) Apa hambatan pelaksanaan program?
	Kebijakan	1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial pascabencana? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tersebut?

3. *Keuchik Gampong Blang Seunong*

DIMENSI PENELITIAN	INDIKATOR PENELITIAN	PERTANYAAN PENELITIAN
Akuntabilitas	Hukum dan kejujuran	1) Bagaimana penilaian bapak terhadap tanggung jawab pemerintah dalam penanganan banjir bandang?

		2) Apakah bantuan yang diberikan pemerintah disalurkan secara adil kepada masyarakat?
	Proses	1) Bagaimana proses evakuasi masyarakat saat banjir terjadi? 2) Bagaimana proses distribusi bantuan kepada masyarakat di desa? 3) Bagaimana koordinasi pemerintah desa dengan BPBD dan Dinas Sosial? 4) Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa?
	Program	1) Program bantuan apa saja yang diterima masyarakat? 2) Apakah program tersebut membantu masyarakat dalam masa pemulihan? 3) Apakah masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi?
	Kebijakan	1) Bagaimana penilaian bapak terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pascabencana? 2) Apakah pemerintah desa dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? 3) Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut?

4. Masyarakat Terdampak

DIMENSI PENELITIAN	INDIKATOR PENELITIAN	PERTANYAAN PENELITIAN
Akuntabilitas	Hukum dan kejujuran	1) Apakah bantuan yang diterima sesuai kebutuhan? 2) Apakah masyarakat mengetahui proses penyaluran bantuan? 3) Apakah pernah ada kendala dalam menerima bantuan?
	Proses	1) Bagaimana proses penerimaan bantuan? 2) Bagaimana pelayanan petugas selama bencana? 3) Kendala apa yang Bapak/Ibu alami?
	Program	1) Program bantuan apa yang pernah diterima? 2) Apakah masih ada kebutuhan yang belum dipenuhi? 3) Apa harapan terhadap program pemerintah?
	Kebijakan	1) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan pascabencana? 2) Apa kendala yang masih dirasakan setelah bencana? 3) Apa saran Bapak/Ibu kepada pemerintah agar penanganan pascabencana lebih baik?

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-776/Un.08/FISIP.I.05/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

BPBD Aceh Timur; Dinas Sosial Aceh Timur

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210802145

Nama : FAUZAN HAKIKI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jalan rantau panjang desa beuringin Kuta trieng Beuringin

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PASCABENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

Banda Aceh, 27 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 September 2026

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Lampiran 4 Dokumen Penelitian



Wawancara dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Timur



Wawancara dengan PLT. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur



Wawancara Dengan Keuchik Gampong Blang Senong



Wawancara Dengan Masyarakat Gampong Beringin



Wawancara Dengan Masyarakat Gampong Beringin



Wawancara Dengan Masyarakat Gampong Beringin



Wawancara Dengan Masyarakat Gampong Beringin



Wawancara Dengan Masyarakat Gampong Beringin

Tabel Pos Pengungsi Aceh Timur

No	Pos Pengungsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Total Pengungsi
1	Alue Ie Mirah	Kab. Aceh Timur	Pante Bidari	Alue Ie Mirah	1.462
2	Blang Nie	Kab. Aceh Timur	Simpang Ulim	Blang Nie	1.512
3	Matang Rayeuk	Kab. Aceh Timur	Simpang Ulim	Matang Rayeuk	640
4	Pante Rambong	Kab. Aceh Timur	Pante Bidari	Pante Rambong	1.855
5	Pengungsian di Kedai Pulut	Kab. Aceh Timur	Peureulak Barat	Beusa Seberang	114
6	Pos Pengungsian Blang Gleum	Kab. Aceh Timur	Julok	Blang Gleum	1.157
7	Posko 2	Kab. Aceh Timur	Pante Bidari	Pante Rambong	137
8	Posko 3	Kab. Aceh Timur	Pante Bidari	Pante Rambong	104
9	Posko 4 Pante Rambong	Kab. Aceh Timur	Pante Bidari	Pante Rambong	188
10	Posko Bencana Banjir Seuneubok Tuha	Kab. Aceh Timur	Pante Bidari	Seuneubok Tuha	502
11	Posko Dayah Babul Muta'alimin	Kab. Aceh Timur	Peureulak Barat	Beusa Seberang	114
12	Posko Dayah Darul Istiqamah	Kab. Aceh Timur	Ranto Peureulak	Paya Unou	264
13	Posko Desa Teumpeun	Kab. Aceh Timur	Peureulak Barat	Teumpeun	212
14	Posko Meunasah Paya Unou	Kab. Aceh Timur	Ranto Peureulak	Paya Unou	108
15	Posko Pengungsi Baurandang	Kab. Aceh Timur	Ranto Peureulak	Beurandang	60
16	Posko Pengungsian Buket Kareung	Kab. Aceh Timur	Pante Bidari	Buket Kareung	805
17	Posko Perjuangan Tauhid Tasawuf	Kab. Aceh Timur	Ranto Peureulak	Kliet	14
18	Posko Rumah Warga	Kab. Aceh Timur	Peureulak Barat	Teumpeun	97

19	Posko Tanggul	Kab. Aceh Timur	Simpang Ulim	Alue Buloh Dua	245
20	Senebok Saboh	Kab. Aceh Timur	Pante Bidari	Senebok Saboh	421



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Fauzan Hakiki
Tempat Tanggal Lahir : Batam, 9 April 2003
Nomor Handphone : 085268932951
Alamat : Beuringin, Peureulak Barat, Aceh Timur
Email : 210802145@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD 2 Negeri Peureulak
Sekolah Menengah Pertama : MTsN 3 Aceh Timur
Sekolah Menengah Atas : SMA 1 Peureulak

Sertifikasi

Ma'had Jami'ah : 84.8 | 2022 | Ma'had Al-Jami'ah
TOEL : 400 | 2025 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : B | 2021 | ICT UIN Ar-Raniry
Magang : A- | 2024 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh